

**TINJAUAN TERHADAP ANARKISME UNJUK RASA MAHASISWA DI
KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2014**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MUHAMMAD. SYUKUR
NIM: 10500111092
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukur
NIM : 10500111092
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 30 November 1988
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Angkatan : 2011
Alamat : Jl. Mamoa ria
Judul : Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa
Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 08 Januari 2016

Penyusun:
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Muhammad Syukur
NIM: 10500111092

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Makassar Tahun 2011-2014", yang disusun oleh Muhammad Syukur, NIM: 10500111092, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2017 M, bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag.	()
Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	()
Munaqisy II	: Dr. Hamzir, S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H.	()
Pembimbing II	: Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi	()

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Tinjauan Umum Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014”**.

Kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak, baik dalam sugesti dan motivasi moril maupun materil. Karena itu penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penyusun Ibunda tersayang **Ibunda Hapia** yang selalu membantu dan menyemangati saya melalui pesan-pesan dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau dan kepada **Ayahanda Usman** .

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si.** Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawan.

2. **Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag**, sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis
3. **Ibu Istiqamah, S.H., M.H.** selaku Ketua Jurusan dan **Bapak Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.** selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Bapak Ashabul Kahfi, S. Ag., M.H.** selaku pembimbing I dan **Bapak Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi.** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. **Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag .** selaku Penguji I dan **Bapak Dr.Hamsir, S.H., M.H.** selaku Penguji II yang telah siap memberikan nasehat, saran dan perbaikan daam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setiap saat mewarnai hidupku dalam suka dan duka
9. Sahabat **KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 50** dari Desa Bentang Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, sukses untuk kita semua kawan.
10. Saudara-saudariku tercinta, **Kakak Hasriani, Kakak Nurwah dan Adinda Khairul Anwar.**

11. Senior- senior yang selalu siap mengayomi, **Bang Alex, Bang Darwis, Bang Dewa** serta **Adinda Rofy**.
12. Keluarga Besar **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum UINAM**.
13. Keluarga Besar **Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya**
14. Keluarga Besar **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sapma Pemuda Pancasila SUL-SEL**.
15. Keluarga Besar **KNPI Kab. Gowa**.
16. Keluarga Besar **Mari Berpendidikan Hukum (MBH)**.
17. Keluarga Besar **Bodrex LAW**.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin yaarabbalamin*.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Maret 2017

Penyusun,

Muhammad Syukur

NIM: 10500111092

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TERANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-37
A. Pengertian Anarkisme	13
B. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi	15
C. Pengertian Mahasiswa	22
D. Sejarah Demonstrasi Di Dunia	23
1. Amerika.....	23
2. Mesir	25
3. Libya	27
4. Indonesia	28
E. Asas-Asas Menyampaikan Pendapat	31
F. Kewenangan Polisi Dalam Menangani Unjuk Rasa Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	33

G. Landasan Hukum Unjuk Rasa.....	36
H. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38-40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41-87
A. Gambaran Umum Kota Makassar	41
1. Geografis dan Demografis Kota Makassar	41
2. Iklim Kota Makassar	44
B. Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2012	45
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Anarkis Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2011-2012	63
1. Dendam lama Antara Mahasiswa dan Pihak Kepolisian	64
2. Perbedaan Pemahaman Mengenai Unjuk Rasa Antar Mahasiswa dan Kepolisian	69
3. Tindakan Refresif Dari Pihak Kepolisian Yang Memancing Amarah Para Pengunjuk Rasa	74
4. Tidak Adanya Sanksi Tegas Terhadap Pelaku Tindak Anarkis Unjuk Rasa	77
5. Jumlah Mahasiswa Pengunjuk Rasa Yang Besar	78
6. Rasa Tidak Puas Para mahasiswa	79
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unjuk Rasa	81
1. Praktek Demonstrasi Pada Masa Khulafaur Rasidin	81

2. Pendapat Para Ulama Tentang Demonstrasi	83
7. Hak dan Kewajiban Dalam Melakukan Demonstrasi Menurut Perspektif Islam	86
BAB V PENUTUP	88-89
A. Kesimpulan	88
B. Implikasi	88
DAFTAR PUSTAKA	90-92
A. Buku	90
B. Peraturan-peraturan	92
C. Internet	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	a		ha (dengan titik bawah)
	Kha	kh	ka dan ha
	Dal	d	De
	al		Zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik bawah)
	ad		de (dengan titik bawah)
	a		te (dengan titik bawah)
	a		zet (dengan titik bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	m	Em
	Nun	N	En
	Wau	w	We
ﺀ	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrof
	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fat ah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fat ah dan y '</i>	Ai	a dan i
أَـ	<i>fat ah dan wau</i>	au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	<i>fat ah dan alif atau y '</i>		a dan garis di atas
	<i>kasrah dan y '</i>		i dan garis di atas
أَـ	<i>ammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *ram*

قَتَلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. T 'marb ah

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t 'marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

: *rau ah al-atf l*
المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*
: *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

: *rabbān*
نَجَّيْنَا : *najjain*
: *al- aqq*
: *nu''ima*
: *'aduwwun*

Jika huruf ber- *tasyd d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi .

Contoh:

: 'Al (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
: 'Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
: *al-bil du*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: *ta'mur na*

: *Syai'un*

: *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله d null h bill h

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum f ra matill h

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata Mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Nas r al-D n al- s

Ab Nasr al-Far b

Al-Gaz l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Ahīl)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Subhanahu wa Ta' la*

saw. = *shallall hu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al-sal m*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4

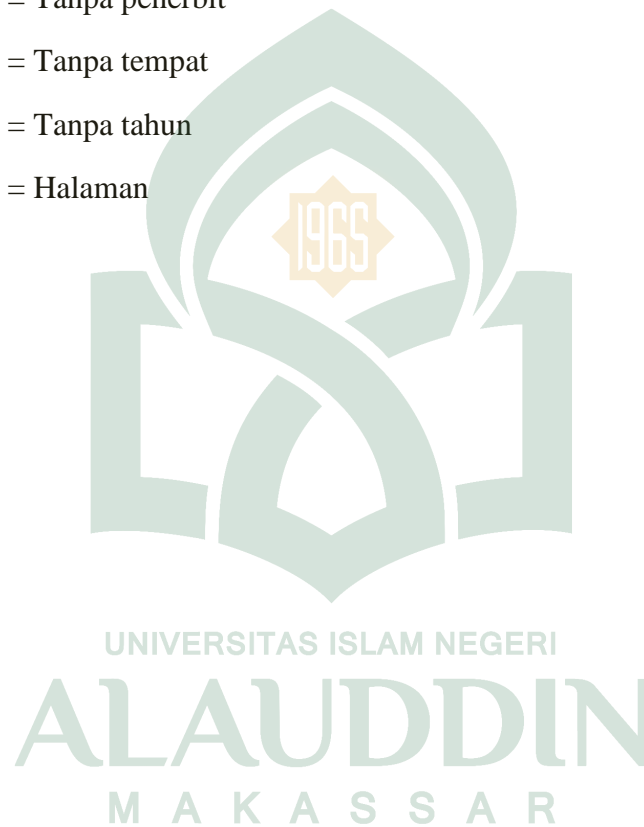
HR = Hadis Riwayat

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Syukur

Nim : 10500111092

Judul :Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014.

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014.”*. Dimana dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) sub masalah yakni: (1) Bagaimana aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di Kota Makassar pada Tahun 2011 dan Tahun 2014?, (2) Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak anarkis pada unjuk rasa Mahasiswa di Kota Makassar pada Tahun 2011 dan Tahun 2014?, Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegiatan unjuk rasa di Kota Makassar pada tahun 2011-2014 marak terjadi dan beberapa kasus unjuk rasa berakhir anarkis terutama jika isu yang menjadi tuntutan para mahasiswa merupakan isu nasional misalnya kenaikan Bahan Bakar Minyak. (2) Tindakan anarkis pada unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu: Dendam lama antara mahasiswa dan pihak kepolisian, Perbedaan pemahaman mengenai unjuk rasa antara mahasiswa dan kepolisian, Tindakan represif dari pihak kepolisian yang memancing amarah para pengunjuk rasa, Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku tindak anarkis unjuk rasa, Jumlah mahasiswa pengunjuk rasa yang besar, Rasa tidak puas para mahasiswa.

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Mencegah terjadinya tindakan anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa dengan melibatkan seluruh komponen yang berperan didalamnya yaitu mahasiswa, aparat kepolisian dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, (2) Menghindari segala factor penyebab terjadinya tindak anarkisme, membangun komunikasi antara pemerintah dan pengunjuk rasa sehingga tidak terjadi tindak anarkis dalam kegiatan unjuk rasa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya setiap manusia yang lahir di dunia memiliki hak asasi sendiri sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan YME. Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh Sang pencipta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut sebagai hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan manusia itu adalah sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun baik itu seseorang, sekelompok maupun oleh Negara.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.¹

Seperti diketahui, Hukum adalah kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, dan pelanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Negara Hukum

yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum dan keadilan di dalam masyarakat kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum, maka harus memenuhi segala persyaratan sebagai sebuah Negara hukum. Yakni mengakui dan melindungi hak serta kewajiban setiap warga negaranya. Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik di pihak pemegang kekuasaan maupun pihak pendukung hak asasi itu sendiri. Kebebasan merupakan syarat untuk mencapai hak. Maka pasti timbul persoalan, sejauh mana kewajiban pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan kebebasan warganya dalam mencapai haknya itu, dan sejauh mana pula kewajiban si pendukung hak asasi itu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan haknya, sesuai dengan asas-asas dan norma-norma hukum yang telah disepakati bersama.²

Salah satu hak dari warga Negara adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Pentingnya kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan serta

² Padmo Wahjono, *Beberapa Masalah Ketata Negara di Indonesia* (Jakarta : CV Rajawali, 1984) h .60.

kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga Negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh Negara.

Hak untuk menyampaikan pendapat juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu QS asy-Syura/42:38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”

Mufrodat dari ayat diatas yaitu : Penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian, رَبِّهِمْ : Benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka. أَمْرُهُمْ : Amruhum/ urusan mereka menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. : Mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.

Ayat di atas menyatakan : dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka melaksanakan shalat secara bersinumbang dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu' kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui

musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambungan baik nafkah wajib maupun sunnah.

Musyawarah dalam Islam juga dijelaskan dalam QS. Al imran/3:159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”

Adapun tafsir mufrodat dari ayat di atas adalah : (keras hati) adalah ungkapan untuk muka yang selalu masam, tidak peka terhadap segala keinginan dan kurang memiliki rasa kasih sayang, : artinya keras dan kasar dan : memisahkan diri.

Ayat ini memiliki hubungan yang erat terhadap peristiwa Perang Uhud. Pada peristiwa tersebut kaum muslim mengalami kekalahan telak akibat hilangnya disiplin sebagian tentara Islam terhadap perintah yang telah ditetapkan nabi. bahkan dalam

satu riwayat pada waktu itu Nabi terluka sangat parah dan giginya rontok. Ayat ini serta beberapa ayat berikutnya merupakan penjelasan tentang sikap dan sifat nabi sebagai leader yang mesti diambil ketika menghadapi fakta yang tidak sesuai dengan instruksinya sekaligus sebagai sugesti dari Allah agar selalu optimis dalam perjuangan. Jadi ayat ini merupakan ayat *leadership* dan musyawarah di tengah-tengah keadaan yang sangat darurat dalam peperangan, nabi tetap mengedepankan hasil keputusan musyawarah bersama para sahabat tentang bagaimana mensiasati taktik perang di gunung Uhud.

Dari hasil musyawarah tersebut nabi mengikuti pendapat mayoritas sahabat, meskipun hasilnya sangat mengecewakan karena berakhir dengan kekalahan kaum muslim, saat itulah Rasulullah memutuskan untuk menghapuskan adanya konsep musyawarah. Namun dengan turunnya ayat ini, Allah berpesan kepada nabi bahwa tradisi musyawarah tetap harus dipertahankan dan dilanjutkan meskipun terbukti terkadang hasil keputusan tersebut keliru.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka

umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum memberikan hak kepada warga untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".³

Oleh karena itu, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk aspirasi masyarakat dalam mengeluarkan pendapatnya sebagai hak warga Negara yang bebas menyampaikan pendapatnya, namun haruslah dilakukan secara bertanggung jawab.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Unjuk rasa belakangan ini pada dasarnya semakin marak sejak jatuhnya rezim orde baru, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak melihat, mendengar bahkan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan unjuk rasa.

Gejolak unjuk rasa atau demonstrasi yang saat ini sedang marak, mengundang komentar banyak pengamat. Sebagian mereka mengatakan "*Aksi unjuk rasa ini*

³ Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 *Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*

dipelopori oleh oknum-oknum tertentu.” Sedangkan yang lain berkata : *“demonstrasi ini adalah ungkapan hati nurani rakyat.”* Demikian komentar para pengamat tentang demonstrasi yang terjadi di hampir semua Perguruan Tinggi di Indonesia. Sebagian dari mereka menentangnya dan menganggap para mahasiswa ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Sebagian lain justru mendukung mati-matian dan menganggapnya sebagai jihad.⁴

Pada hakikatnya unjuk rasa merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengeluarkan pendapat agar terpenuhi kepentingannya. Namun sekalipun sudah terdapat pengaturannya, ada kalanya kita menemukan praktek yang dapat mencederai tujuan dari unjuk rasa itu sendiri. Misalkan tindakan anarkis dari para demonstran. Aksi unjuk rasa atau unjuk rasa seringkali berakhir menjadi aksi yang anarkis berupa pelemparan, kejar-mengejar dengan petugas kepolisian, pembakaran, perampokan, bahkan yang lebih fatal memakan korban jiwa tanpa memikirkan tercapainya tujuan awal unjuk rasa tersebut.

Salah satu cara para demonstran agar mendapat perhatian dengan melakukan tindakan berupa pembakaran dan pengrusakan kendaraan-kendaraan yang melintas dan yang menjadi sasaran utama adalah kendaraan berplat merah/pemerintah yang merupakan kendaraan dinas dengan aksi unjuk rasa anarkis inilah yang terkadang malah banyak pihak yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit.

⁴ Demonstrasi Unjuk Rasa Laki-laki dan Perempuan di Jalan Menentang Kepada Pemerintah yang Dilarang Rasulullah, <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/05/19/de>. (tanggal 26 Juli 2015)

Unjuk rasa yang terjadi pada mahasiswa Makassar pada Tahun 1996 yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Muslim Indonesia yang mengakibatkan banyaknya korban luka-luka sampai 3 orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan peristiwa Amarah. Merupakan salah satu contoh unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan banyak kerugian bagi banyak pihak.⁵

Kota Makassar termasuk salah satu kota yang mahasiswanya begitu antusias dengan gerakan demonstrasi atau unjuk rasa turun ke jalan. Berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Makassar menggunakan aksi unjuk rasa sebagai jalan untuk menyampaikan aspirasi. Meskipun demikian, unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar akhir-akhir ini sering mengambil jalur yang ekstrim seperti menutup jalan, melakukan pengrusakan fasilitas umum serta bentrok dengan aparat kepolisian.

Ketika aksi unjuk rasa sudah berbau unsur politik, maka kerap kendaraan-kendaraan bernomor polisi merah selalu menjadi favorit aksi kekerasan yang tidak luput dari tindakan pembakaran dan pengrusakan.

Melihat berbagai tindakan unjuk rasa anarkisme yang dilakukan, dapat dilihat bahwa banyak pihak yang merasa dirugikan, khususnya mobil dinas (bernomor polisi merah) yang pada dasarnya pengadaanya menggunakan uang rakyat. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penyusun berinisiatif meneliti tentang **“Tinjauan Terhadap Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014”**

⁵ Amarah April Makassar Berdarah 1996, <http://www.pustakasekolah.com/> (tanggal 28 Juni 2015)

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam Penelitian ini, yang menjadi titik fokus permasalahan yang akan diteliti yakni apa yang melatarbelakangi terjadinya Unjuk Rasa dan yang dapat menimbulkan kekerasan dan anarkis baik antara mahasiswa dengan polisi, mahasiswa dengan masyarakat dan bahkan masyarakat dengan polisi itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di Kota Makassar pada Tahun 2011 dan Tahun 2014?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya tindak anarkis pada unjuk rasa Mahasiswa di Kota Makassar pada Tahun 2011 dan Tahun 2014?

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan unjuk rasa akan tetapi tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Tinjauan* dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dsb). Definisi tinjauan menurut Acham Elqorni adalah “Peninjauan kembali (*review*) tentang

masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi”. Namun, *tinjauan* yang dimaksud dalam judul penelitian ini menyelidiki tindak anarkisme yang terjadi di setiap kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2011-2014.

2. Anarkisme dalam setiap unjuk rasa merupakan hal yang biasa ditemui. Dalam setiap kegiatan unjuk rasa mahasiswa kebanyakan berakhir ricuh, anarkis atau bentrok.
3. Anarkisme, secara etimologi berasal dari kata dasar “anarki” dengan imbuhan-isme. Kata anarki merupakan kata serapan dari *anarchy* (bahasa Inggris) atau *anarchie* (Belanda/Jerman/Perancis), yang berakar dari bahasa Yunani, *anarchos/anarchein* yang berarti “tanpa pemerintahan” atau “pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan memerintah dan diperintah, menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai dan lain sebagainya.”⁶
4. Secara terminologis dikatakan bahwa anarkis adalah sebuah system sosialis tanpa pemerintahan, yaitu dimulai antar manusia dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama hal itu merupakan pergerakan dari manusia itu sendiri.⁷

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anarkisme> (Jumat, 23 oktober 2015)

⁷ <http://ensiklo.com/2014/08/apa-arti-anarki-anarkis-bukanlah-tindak-kekerasan-dan-perusakan/> (Jumat, 23 Oktober 2015)

5. Anarkis kerap kali terdengar dalam konteks dan pemahaman yang salah.

Dewasa ini anarkis lebih memiliki arti sebagai tindakan kekacauan ataupun perbuatan pengrusakan. Anarkis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tindakan kekerasan terhadap pihak lain.

Unjuk rasa atau demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menunjukkan cara kerja, cara perbuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. Akan tetapi unjuk rasa atau demonstrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat mengetahui aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar dalam kurun waktu Tahun 2011-2014.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor atau penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindakan anarkis dalam kegiatan unjuk rasa mahasiswa pada Tahun 2011-2014.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang kegiatan unjuk rasa.
- b. Dapat menjadi bahan informasi dan bahan masukan bagi para pengamat hukum atau aparat hukum mengenai tindakan anarkisme unjuk rasa mahasiswa.
- c. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat, kalangan intelektual tentang kegiatan unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar dan memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum oada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam kaityannya dengan masalah yang di bahas dalam skripsi dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anarkisme

Kata "anarki" berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti "tidak", "ingin akan", "ketiadaan", atau "kekurangan", ditambah archos yang berarti "suatu peraturan", "pemimpin", "kepala", "penguasa", atau "kekuasaan". Atau, seperti yang dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti "melawan penguasa". Meski kata-kata Yunani *anarchos* dan *anarchia* seringkali diartikan "tidak memiliki pemerintah" atau "ada tanpa pemerintah", seperti yang dapat dilihat, arti orisinil anarkisme yang tepat bukanlah sekedar "tidak ada pemerintah". "Anarki" berarti "tanpa suatu peraturan" atau lebih umum lagi, "tanpa kekuasaan", dan dalam pemahaman inilah kaum anarkis terus menggunakan kata ini. Anarki berarti "tidak memerlukan tatanan, seperti yang dipikirkan pada umumnya, namun suatu ketiadaan peraturan".⁸

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Anarki" berarti hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu Negara). Sedangkan "anarkis" artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarki. Anarkisme adalah suatu ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan Negara, atau dapat diartikan suatu teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan Undang-undang.

⁸ <http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/01/tentang-anarkisme-bagian-I-apa-itu.html> (Selasa, 27 Oktober 2015).

Sebagai suatu paham atau pendirian filosofis masyarakat akan membawa manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmonis dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga bukanlah sesuatu keyakinan yang salah. Anarkisme juga dapat didefinisikan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Peter Kropotkin : Anarkisme adalah sebuah system sosialis tanpa pemerintahan, ia dimulai diantara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia.
- b. Menurut Errico Malatesta : Penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang menindas.
- c. Menurut Alexander Berkman : Anarkisme berarti bahwa anda harus bebas. Bahwa tidak ada seorangpun boleh memperbudak anda, menjadi majikan anda, merampok anda, ataupun memaksa anda.

Anarkisme atau dieja *anarkhisme* yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk Negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhkan suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh Karena itu Negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap

tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁹

Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan pengrusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat).

B. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi

Demonstrasi, terutama akhir-akhir ini tampaknya menjadi opsi yang dianggap paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik oleh sebagian rakyat Indonesia, khususnya para aktivis pergerakan mahasiswa dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya merugikan rakyat. Mungkin mereka merasa belum cukup dengan suara yang telah dititipkan pada wakilnya. Sehingga demonstrasi itu menjadi alternatif terakhir dan terbaik yang mesti ditempuh.

⁹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalila, 2002), h .11

Dalam era reformasi yang demokratis ini, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang salah, karena memang itu adalah sebuah konsekuensi atas pilihan kita terhadap system demokrasi yang telah disepakati, dimana setiap orang berhak berpendapat dan mengkritisi itu bukanlah berarti dengan sekehendaknya menghujat orang lain tanpa batas-batas kesopanan dan kepatutan, yang justru melanggar hak orang lain yaitu hak untuk dihormati dan dihargai. Bukan pula demokrasi itu bermakna bahwa setiap orang bisa turun kejalan berdemonstrasi sambil melakukan aksi anarkis dengan merusak fasilitas-fasilitas umum sembari menuntut perubahan secara instan.

Untuk mengetahui lebih rinci persoalan demonstrasi, demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda dan dari sudut pandang yang berbeda pula.

Demonstrasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. *Pertama*, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara missal yaitu unjuk rasa. *Kedua*, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.¹⁰

Dalam Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah unjuk rasa, tindakan bersama untuk menyatakan protes, pertunjukan mengenai cara-cara penggunaan suatu alat, pamer (kekuatan yang mencolok).¹¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di

¹⁰ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang : Lintas Media).

¹¹ Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arloka, 1994), h. 100.

Muka Umum, Pasal 1 ayat (3) dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹² Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin.

Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatral. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998.

mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.¹³

Sesuai dengan pengertian dari demonstrasi seperti terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa demonstrasi juga merupakan unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga Negara. Tetapi, inilah hak yang mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarkis sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Unjuk rasa atau Demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Ini artinya ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandangan masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Demokrasi adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, demonstrasi harus berhenti ketika pendapat mereka sudah disampaikan.

¹³ M. Mursyid PW *Unjuk rasa : Tinjauan dari Sudutu andang Edukasi dalam media Peduli* . <http://mmursyidpw.wordpress.com>.

Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara atau kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

Dalam praktik demonstrasi, kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak aksi demonstran yang berakhir dengan kerusuhan dan mengarah pada tindakan anarkis. Tindakan anarkis yang terjadi dilakukan oleh para pendemonstran itu sendiri.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak warga Negara. Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi atau berunjuk rasa merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan factor-faktor lain seperti adanya hasuta dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan

tindakan anarkis, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarkis.

Demonstrasi atau unjuk rasa atau gerakan rakyat merupakan hal yang sudah wajar terjadi di Negara-negara yang menganut paham demokrasi. Apalagi ketika suatu rezim atau pemerintahan sudah dirasa tidak baik atau melenceng dari jalannya, biasanya mahasiswa yang paling kritis terhadap hal itu dan segera melakukan demonstrasi ke jalan. Mahasiswa dengan semangat dan gejolak masa muda serta sifat kritis yang ada dalam dirinya, dengan begitu semangat melakukan demonstrasi dan menuntut terjadinya perubahan. Pokoknya setiap ada sesuatu yang tidak beres di pemerintahan, mahasiswa pasti turun ke jalan dan segera menyuarakan perubahan.

Perwujudan kehendak warga untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut maka undang-undang tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi

dapat melindungi hak dan warga negara sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik serta hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya.

Sedangkan dalam Islam demonstrasi disebut dengan *muzha'haroh*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi'arkannya dalam bentuk pengerahan massa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.¹⁴

Pada intinya unjuk rasa merupakan pernyataan pendapat atau lebih jauh lagi aspirasi dari sejumlah warga masyarakat yang dapat berupa reaksi atau tanggapan yang bersifat mendukung atau menolak perilaku.¹⁵ Jadi, Demonstrasi anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Politik*, (Jakarta : DU CENTER), h. 77.

¹⁵ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan; Menilik Kelahiran UU Unjuk Rasa* (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999), h.7.

pemerintahan masa Orde Baru, akhirnya sekarang tiada hari tanpa demonstrasi. Akan tetapi demonstrasi sekarang tidak lagi berlangsung tertib.

C. Pengertian Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Umumnya mahasiswa berada pada tahapan remaja akhir, yaitu berusia 18-21 tahun. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Mahasiswa adalah manusia yang tercipta untuk selalu berpikir yang saling melengkapi (Siswoyo, 2007).

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012 : 5). Beberapa definsi mahasiswa menurut para ahli:

- a. Menurut Knopfemacher : mahasiswa adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik & diharapkan menjadi calon-calon intelektual.
- b. Menurut Sarwono : mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30

tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.

Mahasiswa adalah individu yang belajar dan menekuni disiplin ilmu yang ditempuhnya secara mantap, dimana dalam menjalani serangkaian kuliah itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa itu sendiri, karena pada kenyataannya diantara mahasiswa ada yang sudah bekerja atau disibukkan oleh kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ganda, 2004).

D. Sejarah Demonstrasi di Dunia

1. Amerika

Pada musim semi tahun 1887 suatu jurnal pertanian di *North Carolina* dengan sangat cermat menyatakan apa yang banyak diperhatikan oleh petani di seluruh pelosok Amerika Serikat.¹⁶ Isi jurnal tersebut, menggambarkan bagaimana nasib para petani di Amerika Serikat waktu itu dan menceritakan kenyataan pahit bagi para petani yang jauh dari kemakmuran.

Sampai abad ke-19, kehidupan pekerja industry jauh dari mudah. Bahkan diwaktu yang baik pun upah tetap rendah, jam kerja panjang, dan kondisi pekerjaan berbahaya. Sedikit saja kemakmuran yang muncul karena pertumbuhan Negara ini yang bisa dirasakan para pekerja. Situasi ini lebih buruk lagi bagi wanita dan anak-

¹⁶ Allen F. Davis dan Harold D. Woodman, *Konflik dan Konsensus Dalam Sejarah Amerika Modern*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991), h..111.

anak yang merupakan tenaga kerja dengan presentase tinggi di beberapa industri, tetapi seiring menerima upah yang jauh lebih kecil dari kaum pria. Krisis ekonomi secara berkala melanda seluruh negeri sehingga mengikis upah butuh industri dan membuat pengangguran semakin tinggi.¹⁷

Sebelumnya berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan nasib buruh. Upaya besar pertama untuk membentuk kelompok pekerja yang berbasis nasional ditandai dengan munculnya *The Noble Order of The Knights of Labor* (Orde mulia ksatria pekerja) di tahun 1869. Namun pada akhirnya *The Knights of Labor* mengalami kemunduran, sehingga kaum buruh melakukan aksi mogok kerja pada tahun 1877 lewat pemogokan besar di seluruh negeri karena pemotongan upah sebesar 10 persen (%). Usaha-usaha yang dilakukan untuk membubarkan pemogokan ini menyebabkan terjadinya kerusuhan dan perusakan dalam skala luas di beberapa kora seperti Baltimore, Maryland, Chicago, New York dan berbagai kota di Amerika Serikat lainnya.

Insiden Haymarket Square terjadi 9 tahun kemudian. Ketika itu seorang melemparkan bom ke sebuah pertemuan yang sedang mendiskusikan pemogokan yang sedang berlangsung di Chicago, insiden itu menewaskan 9 orang dan melukai 60 orang.¹⁸ Selanjutnya terjadi kerusuhan pada tahun 1893 di pengecoran baja Carnegie di Homestead, Pennsylvania. Satu grup yang terdiri dari 300 detektif Pinkerton membubarkan aksi demo pemogokan kerja yang dilakukan oleh gabungan

¹⁷ Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, Penerjemah; Yusi A Pareanom. h. 233.

¹⁸ Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, h. 235.

asosiasi pekerja besi, baja dan timah dengan melakukan tembakan dan 10 orang menyebabkan meninggal.

2. Mesir

Di bawah Konstitusi Mesir 1971, Presiden Mubarak memiliki kuasa yang luas atas Mesir. Bahkan dia dianggap banyak orang sebagai seorang diktator.¹⁹ Rezim diktator Husni Mubarak terkenal dengan korupsinya. Salah satunya adalah korupsi besar-besaran yang terjadi di Kementerian Dalam Negeri Mesir. Hal ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kekuasaan terhadap sistem institusional yang diperlukan untuk mengamankan posisi sebagai presiden yang dipegang oleh Husni Mubarak dalam waktu yang sangat lama. Tindakan korupsi tersebut juga mengakibatkan banyak politikus dan aktivis-aktivis muda yang dipenjara tanpa menjalani masa persidangan. Selain itu, rezim Husni Mubarak juga memiliki banyak penjara rahasia dan memberikan kebebasan kepada kroni-kroninya untuk mengganggu privasi rakyat.

Hingga tahun 1999, Husni Mubarak sudah terpilih menjadi presiden selama 5 kali. Hal ini tentu memunculkan tekanan, baik domestik maupun internasional, agar Mesir segera melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu pada 26 Februari 2005, Husni Mubarak memerintahkan parlemen untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara tersebut, sehingga memungkinkan adanya calon lain dalam pemilihan presiden.

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak

Pada tanggal 8 September 2005, salah seorang calon kalah, Ayman Nour. Dia menolak hasil pemilu tersebut dan menuntut dilakukannya pemilu ulang. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena Ayman Nour justru tertuduh melakukan pemalsuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.²⁰

Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Mesir pun mulai bergejolak. Pada 25 februari 2011, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Para demonstan berkumpul di Tahrir Square. Guna mengatasinya, Husni Mubarak mengerahkan kekuatan militer untuk membubarkan para demonstan tersebut. Bentrokan pun tidak terhindarkan. Kerusuhan pun terjadi dimana-mana.

Tindakan represif yang dilakukan oleh kekuatan militer Husni Mubarak menyebabkan banyak korban berjatuhan dari pihak demonstan. Sekitar 850 orang demonstan terbunuh dalam peristiwa tersebut. Adapun Husni Mubarak bersikeras mempertahankan kekuasaannya. Karena posisinya semakin tersudut, Husni Mubarak mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu yang akan digelar pada bulan September. Akan tetapi, ia juga menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan masa pemerintahannya dan menjanjikan adanya reformasi konstitusional. Pernyataan ini tetap tidak diindahkan oleh para demosntran. Bahkan, mereka yang sudah berkumpul di depan istana presiden mulai melakukan tindakan yang anarkis.

²⁰ Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, (Jogjakarta : FlashBooks, 2012), h. 156.

Pada 11 februari 2011, Wakil presiden Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada pihak militer. Pada 28 februari 2011, jaksa penuntut umum Mesir mengeluarkan larangan bagi Husni Mubarak dan keluarganya keluar dari Mesir. Setelah itu, Husni Mubarak menjalani tahanan rumah. Pemeriksaan terhadapnya dan keluarganya dimulai pada 13 april 2011.²¹

3. *Libya*

Ketika Muammar Gaddafi berhasil menduduki kursi kepresidenan di Libya, Gaddafi menjelma menjadi rezim yang otoriter dan diktator. Salah satu tindakan otoriternya yaitu, ia melakukan “pembersihan” etnis dan pengusiran terhadap orang-orang Italia yang tinggal di Libya. Sebenarnya Libya adalah sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak. Akan tetapi, Negara ini tidak tergolong maju secara ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi dan kroni-kroninya. Sebagian besar perusahaan yang ada dikuasai oleh keluarga dan orang-orang yang didekatnya.²² Sementara itu, banyak rakyat Libya yang hidup dalam kemiskinan.

Pada tahun 1990, rezim Muammar Gaddafi menghadapi oposisi yang semakin besar dari pemberontak yang dilakukan oleh *Libyan Islamic Fighting Group*. Kelompok pemberontak tersebut hampir berhasil membunuhnya pada tahun 1996.

²¹ Hamid bahri, *Para Diktator Terheboh di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, h.158.

²² Hamid Bahri, *Para Diktator terheboh di Dunia Yang Berhasil Digulingkan* (Jogjakarta : Flashbooks, 2012). h.162.

Untuk mengatasinya, Muammar Gaddafi memerintahkan kepada tentaranya untuk melakukan tindakan represif kepada orang-orang yang menentangnya.

Menyusul tumbangnya beberapa rezim diktator di Timur Tengah, Libya pun mulai ikut bergejolak. Pada 17 februari 2011, terjadi demosntrasi besar-besaran yang mendesak Muammar Gaddafi untuk turun. Demonstrasi tersebut menimbulkan banyak kekacauan hampir di seluruh bagian Libya. Pertempuran antara tentara Muammar Gaddafi dan pihak oposisi terjadi dimana-mana. Beberapa kota Libya berhasil dikuasai oleh para pemberontak.

Pada tanggal 25 Agustus 2011, hampir semua bagian di Tripoli berhasil dikuasai oleh para pemberontak. Muammar Gaddafi berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya pada 20 Oktober 2011. Akhirnya Gaddafi tumbang oleh para demonstrasi dan oposisi yang menuntutnya untuk mundur dari jabatannya.

4. *Indonesia*

Kekuasaan presiden semasa rezim Orde Baru Soeharto terasa sangat absolut. Melihat hal ini sama terjadi pula sebelumnya dalam paruh kedua kekuasaan rezim Soekarno (1959-1966). Maka absolutisme lembaga kepresidenan ini tidak terlepas dari kelemahan UUD 1945 dan sistem pemilihan presiden secara bertahap lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan memanfaatkan kelemahan itu, Soeharto bisa dipilih berkali-kali dan berkuasa selama lebih dari 30 tahun.

Selama kepemimpinannya akhir dekade 1990-an Soeharto dikenal sebagai presiden diktator yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Banyak yang percaya

bahwa ia bukan lagi semata-mata presiden melainkan raja.²³ Dia juga dikenal sebagai presiden yang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia terutama mahasiswa sudah tidak percaya lagi terhadap kepemimpinannya.

Badai besar yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari kekuasaan yang dipegangnya selama lebih dari 30 tahun itu bermula dari krisis moneter yang melanda Indonesia awal Juli 1997.²⁴ Respon pertama pemerintah terhadap krisis moneter mencerminkan kesombongan dan kurangnya kesadaran terhadap realitas. Adanya seruan-seruan menuntut reformasi dari banyak pihak, tapi tetap tidak mendatangkan hasil.

Tuntutan akan reformasi terus semakin meningkat seiring semakin memburuknya krisis ekonomi dan semakin jelas bahwa rezim ini tidak mampu mereformasikan diri. Demonstrasi mahasiswa meluas dan semakin marak.²⁵ Morat-maritnya perekonomian Indonesia, melambung tingginya harga-harga barang, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menyempitnya kesempatan kerja, memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi keprihatinan.

Pada awalnya aksi keprihatinan mahasiswa itu digelar di dalam kampus saja, dan itu pun hanya melibatkan segelintir mahasiswa. Sesekali ada juga sekelompok

²³ Muhammad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 2.

²⁴ James Luhulima, *Hari-Hari Panjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), h.78.

²⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 2001-2008*, (Cet. I ; Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), h. 689.

mahasiswa yang datang ke DPR dan menggelar aksi disana. Memasuki bulan Januari 1998, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam aksi-aksi keprihatinan meningkat menjadi ratusan orang. Bukan itu saja aksi keprihatinan di kampus-kampus di berbagai kota itu juga melibatkan alumni dan dosen. Semakin maraknya demonstrasi, ABRI membiarkannya selama demonstrasi itu digelar atau dilakukan dalam kampus. Tapi, awal Mei, mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan di kota besar. Kerusuhan besar pertama kali terjadi di Medan. Pada tanggal 12 Mei, penembak jitu ABRI menembak mati empat mahasiswa demonstran di Universitas Trisakti Jakarta. Pada saat itu, tokoh-tokoh militer termasuk Jenderal Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bahwa rezim Soeharto tak bisa dipertahankan lagi.

Keesokan harinya, tanggal 13 Mei 1998 siang, usai pemakaman keempat mahasiswa itu, ribuan mahasiswa Trisakti mengadakan aksi berkumpul di kampusnya. Massa mulai menyemut di sekitar kampus Trisakti. Mereka ingin bergabung dengan para mahasiswa, namun dicegah oleh aparat keamanan. Akibatnya massa mengamuk dan mereka mulai mengadakan aksi pelemparan dan pengrusakan.

Sejak peristiwa itu, para demonstran tak terbendung lagi, baik yang dilakukan di kota maupun di daerah-daerah. Akibatnya, kerusuhan, pengrusakan bangunan-bangunan, pembakaran rumah dan toko-toko dilakukan oleh para demonstran guna menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan para demonstran meminta agar Soeharto mampu mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, presiden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia karena disebabkan

banyaknya tuntutan yang dikeluarkan baik dari DPR, MPR dan para demonstrasi yang sudah tidak terbendung lagi.

E. Asas-Asas Menyampaikan Pendapat

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998).²⁶ Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No.9 Tahun 1998), yaitu :

- a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, h.119.

partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

- d. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- e. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyampaikan pendapat terdapat lima (5) asas yang menjadi landaasan yaitu :

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas mufakat

Yang dimaksud atas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga Negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika

individual, etika sosial dan etika institusi.²⁷ Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan berikut, yakni :

- a) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
- d) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

F. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Polri sebagai aparat penegak hukum secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga kamtibmas sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang kamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya akan

²⁷ Peri Herianto, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (Studi Kasus Unjuk Rasa di Makassar Tahun 2007-2008)*. (Makassar; Fakultas Syariah dan Hukum : 2011). h.36.

selalu dihadapkan apada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat.

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan ini”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No.2 Tahun 2002, menyebutkan bahawa “Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal UU No.9 Tahun 1998 pada Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan : penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf q. UU No. 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa: kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan dengan dengan UU No.9 Tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa

“dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat 91) huruf e. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin kemanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin kemanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara kemanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia adalah :

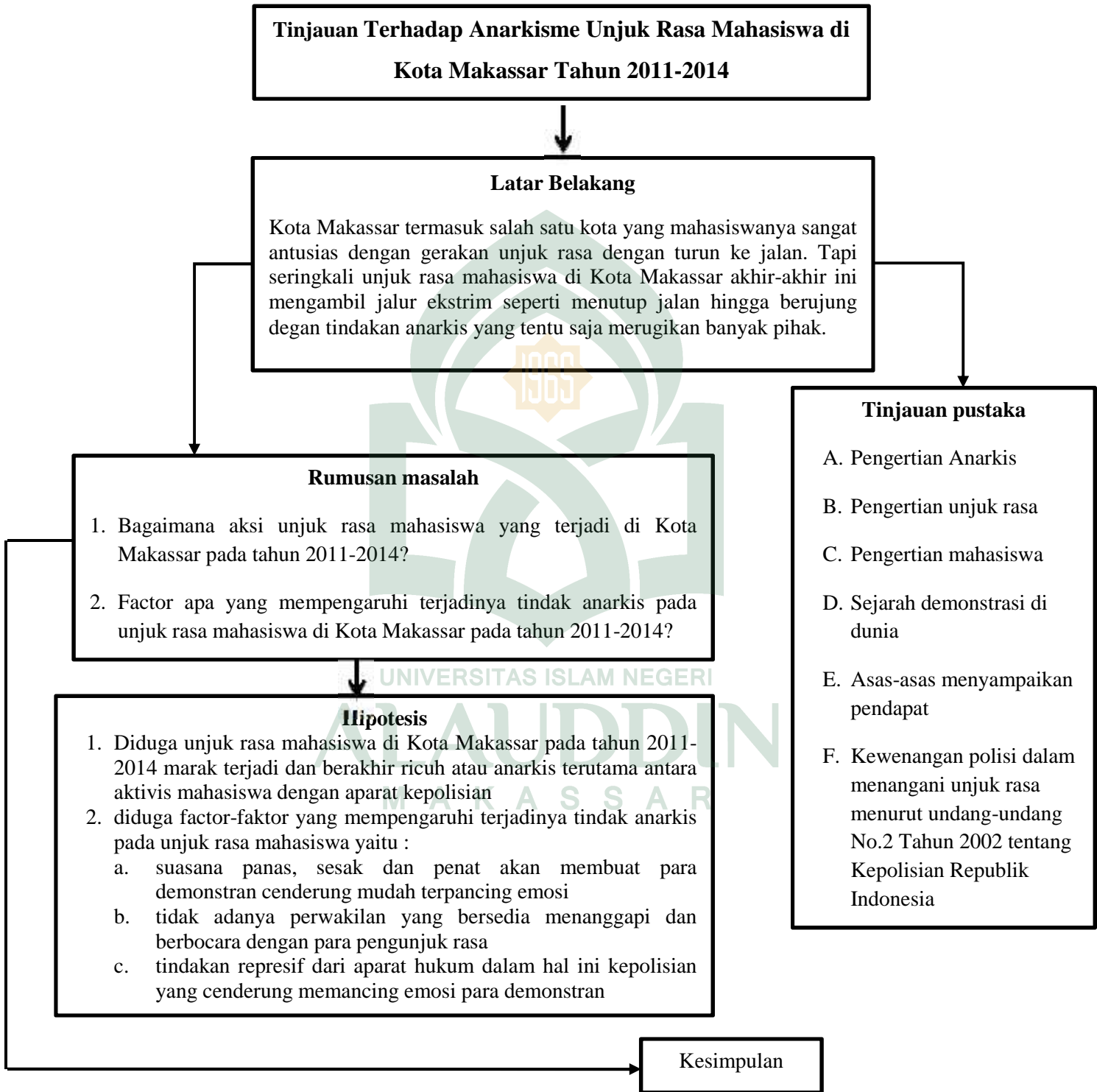
Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.

1. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
2. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
3. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

G. Landasan Hukum Unjuk Rasa

- a. UUD 1945 (amandemen IV)
 - Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
 - Pasal 28 E Ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- b. Ketetapan MPR No.XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- c. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 2 “Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

H. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih karena kota Makassar merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang mana kegiatan unjuk rasa merupakan kegiatan yang sering ditemui dalam rentan tahun 2011-tahun 2014.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat berbagai peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

C. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian, yaitu orang-orang yang terlibat langsung pada kasus-kasus unjuk rasa dalam kurun waktu tahun 2011-2014.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek penelitian ini.

3. Data Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka melengkapi data primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau informan untuk memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dalam menganalisa aksi anarkisme tindak unjuk rasa mahasiswa.

2. Studi Dokumentasi

Yaitu data bersumber dari literature-literatur dengan mengadakan pencatatan terhadap documenter yang berkaitan dengan kasus-kasus unjuk rasa yang anarkis pada tahun 2011-2014 serta menelaah buku-buku, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tindakan anarkisme unjuk rasa, bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga mencakup dari berbagai literatur buku, jurnal baik pada media cetak maupun dari media online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penulisan ini, Data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Analisis data yang dilakukan merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mencari unsure-unsur pokok dari gambaran umum tersebut, kemudian unsure-unsur pokok tersebut dikaitkan satu dengan lainnya sehingga dapat mengetahui tindakan anarkisme unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
2. Induktif yang pada umumnya digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum, misalnya dari hasil wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Geografis dan Demografis Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di Pesisir pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada titik koordinat $119^{\circ}18'97''$ Bujur Timur dan diantara $5^{\circ}8'19''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas $175,77 \text{ Km}^2$ yang meliputi 14 kecamatan.

Secara administratif Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu :

-) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
-) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
-) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
-) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Topografi kota Makassar umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5-10 meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki luas wilayah $175,77 \text{ Km}^2$ yang terbagi ke dalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar.

Adapun pulau-pulau di wilayahnya merupakan bagian dari dua Kecamatan yaitu *Kecamatan Ujung Pandang* dan *Kecamatan Ujung Tanah*. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau Sangkarang,

atau disebut juga pulau-pulau Pabbiring atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-lae, pulau Gusung, dan Pulau Kayangan (terdekat). Untuk mengetahui jumlah luas wilayah di masing-masing kecamatan di Kota Makassar, maka dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%) terhadap luas Kota Makassar
Mariso	1,82	1,04
Mamajang	2,25	1,28
Tamalate	20,21	11,50
Rappocini	9,23	5,25
Makassar	2,52	1,43
Ujung Pandang	2,63	1,50
Wajo	1,99	1,13
Bontoala	2,10	1,19
Ujung Tanah	5,94	3,38
Tallo	5,83	3,32

Panakkukang	17,05	9,70
Manggala	24,14	13,73
Biringkanaya	48,22	27,43
Tamalanrea	31,84	18,12
Total	175,77	100,00

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2015

Penduduk Kota Makassar tahun 2014 tercatat sebanyak 1.369.606 jiwa yang terdiri dari 676.744 laki-laki dan 692.862 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.148.312 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 97,67 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki.

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Biringkanaya, yaitu sebanyak 177.116 atau sekitar 12,93 persen dari total penduduk, disusul kecamatan Tamalate sebanyak 176.947 jiwa (12,92 persen). Kecamatan Rappocini sebanyak 154.184 jiwa (11,26 persen), dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.201 jiwa (1,99 persen).

Ditinjau dari kepadatan penduduk di Kecamatan Makassar adalah yang terpadat yaitu 32.550 jiwa/km², disusul kecamatan Mariso yaitu 31.57 jiwa/km². Sedangkan kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan

penduduk terendah yaitu sekitar 3.305 jiwa/Km² kemudian kecamatan Biringkanaya yaitu 3.673 jiwa/Km², kecamatan Manggala yaitu 5.089 jiwa/Km², kecamatan Ujung Tanah yaitu 7.934 jiwa/Km² dan kecamatan Panakkukang yaitu 8.347 jiwa/Km².

Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut, masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Biringkanaya, kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Manggala.

2. Iklim Kota Makassar

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata, kelembaban udara sekitar 79 persen, temperatur udara sekitar 22,3⁰-33,7⁰C dan rata-rata kecepatan angin 4,4 knot. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Rata-Rata Kelembaban Udara Dirinci Tiap Bulan di Kota Makassar

Bulan	Rata-rata Kelembaban Udara (%)
Januari	88
Februari	86
Maret	85
April	84
Mei	80
Juni	76
Juli	74
Agustus	67
September	68

November	77
Desember	87
Rata-rata : 2014	79
2013	81

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2015

B. Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Kota Makassar Tahun 2011-2014

Maraknya unjuk rasa merupakan gambaran atau potret buruknya kebijakan pemerintah, entah itu kebijakan yang dibuat oleh legislatif ataupun eksekutif. Aksi unjuk rasa sepertinya menjadi pilihan, bila kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak legislatif ataupun eksekutif tidak sesuai. Mungkin Negara lain yang lebih demokratis tidak pernah terjadi unjuk rasa sesering dan semeriah di Indonesia.

Demonstrasi dan kebebasan berpendapat merupakan wadah dalam kehidupan demokrasi. Sehingga aksi-aksi demonstrasi ini tidak dapat dihindari di era demokrasi seperti saat ini. Indonesia terkhususnya kota Makassar sangat menjunjung tinggi demokrasi, sehingga aksi-aksi demonstrasi massa tidak dilarang. Namun tidak jarang aksi-aksi demonstrasi ini berujung pada tindak anarkisme. Kegiatan unjuk rasa juga marak terjadi di Kota Makassar. Untuk memberikan gambaran penanganan unjuk rasa di Kota Makassar, di bawah ini disajikan tabel jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu Tahun 2011-2014, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2011

Bulan	Jumlah Unjuk Rasa	Keterangan	Bulan	Jumlah Unjuk Rasa	Keterangan
Januari	38	18 Kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Juli	44	23 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Februari	34	22 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Agustus	19	9 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Maret	42	25 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	September	39	18 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
April	53	37 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Oktober	88	62 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Mei	80	54 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	November	31	22 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Juni	49	35 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Desember	60	49 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa

Sumber : Kantor Polrestabes Kota Makassar

Tabel 4.2 Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2012

Bulan	Jumlah Unjuk Rasa	Keterangan	Bulan	Jumlah Unjuk Rasa	Keterangan
Januari	47	23 Kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Juli	41	30 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Februari	40	61 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Agustus	11	21 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Maret	232	190 Kali Unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	September	76	50 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa

April	60	43 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Oktober	94	61 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Mei	76	49 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	November	84	63 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Juni	70	53 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Desember	2 ⁸	67 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa

Sumber : Kantor Polrestabes Kota Makassar

Tabel 4.3 Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2014

Bulan	Jumlah Unjuk Rasa	Keterangan	Bulan	Jumlah Unjuk Rasa	Keterangan
Januari	32	21 Kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Juli	27	12 kali Unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Februari	41	31 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Agustus	26	11 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Maret	36	25 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	September	36	34 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
April	45	36 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	Oktober	37	20 kali Unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Mei	61	47 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa	November	147	131 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa
Juni	29	14 kali unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa			

Sumber : Kantor Polrestabes Kota Makassar

Dari tabel 4.1, tabel 4.2 dan tabel 4.3 diketahui bahwa kegiatan unjuk rasa di kota Makassar cukup tinggi dan pelaksanaannya didominasi oleh mahasiswa. Pada tahun 2011 jumlah unjuk rasa yang terjadi yaitu sebanyak 577 kali dan 374 kali dilaksanakan oleh mahasiswa, tahun 2012 jumlah unjuk rasa sebanyak 913 kali dan sebanyak 711 unjuk rasa dilakukan oleh mahasiswa. Pada tahun 2014, kegiatan unjuk rasa mencapai 517 dan sebanyak 382 kali dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan kegiatan unjuk rasa di Kota Makassar pada tahun 2013 juga cukup intens. Meskipun tidak ada data resmi mengenai jumlah unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2013, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa pada tahun 2013 kegiatan cukup marak terjadi. Isu-isu yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa yaitu diantaranya penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat pengurangan subsidi, permintaan untuk pengesahan Ranperda Disabilitas serta aksi buruh.

Maraknya unjuk rasa di Kota Makassar membuktikan bahwa masih banyaknya kebijakan pemerintah yang mendatangkan pro dan kontra yang tak pelak akan memancing reaksi keras dari beberapa kalangan terutama bagi mahasiswa. Kegiatan unjuk rasa oleh mahasiswa dengan fungsinya sebagai *agent of change*, *sosial of control* dianggap sebagai satu-satunya tempat untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan aspirasi masyarakat yang tak didengar oleh para petinggi-petinggi Negara. Aksi turun ke jalan mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Kota Makassar ini katanya menjadi sebuah bentuk nyata penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Mahasiswa memang mempunyai kewajiban intelektual sekaligus moral keagamaan untuk menyampaikan yang benar itu benar dan berani menyalahkan apa yang mereka yakini sebagai kesalahan. Mahasiswa tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin bisa bergerak. Mahasiswa menaruh perhatian peranan dan penting dalam masyarakat. Tokoh nasional, Amien Rais mengungkapkan rakyat yang berkarakter cenderung statis, tidak bergerak karena ada perasaan takut salah, kadang putus asa, dan kadang apatis. Mahasiswa-lah yang mendinamiskan kelambanan rakyat. Mahasiswa itu seperti filosofi arang, kalau ada arang yang panas satu dua tiga maka yang lain akan jadi panas juga.

Pada Tahun 2011-2014, berita media online maupun media visual di Indonesia sarat dengan berita mengenai unjuk rasa mahasiswa tak terkecuali di Kota Makassar. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Kota Makassar dilakukan dengan berbagai cara. Ada mahasiswa yang melakukannya dengan aksi damai, namun ada juga aksi demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis. Jika melihat fakta unjuk rasa hari ini dan masa lalu, nyaris tak ada unjuk rasa tanpa anarkisme. Unjuk rasa dan anarkisme seakan telah ditakdirkan untuk “hidup berpasangan”. Dimana ada unjuk rasa, disitu ada tindakan anarkis. Tidak jarang para pengunjuk rasa yang melakukan aksi anarkis justru merusak fasilitas publik yang dibiayai dengan uang rakyat yang berasal dari hasil pungutan pajak. Aksi demonstrasi anarkis tentunya akan mencoreng wajah demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Kasus unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar yang berujung pada tindakan anarkis pun tak sedikit jumlahnya. Terlebih pada kegiatan unjuk rasa yang

mengangkat isu-isu nasional yang krusial misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai unjuk rasa anarkis yang terjadi pada tahun 2011-2014 yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :



Tabel 4.4 Contoh Anarkisme Unjuk Rasa Mahasiswa Pada Tahun 2011-2014

Tahun	Lokasi	Pelaksana	Isu	Kronologi
2011	Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan A.P Pettarani dan Jalan St.Alauddin	Mahasiswa Universitas Hasanuddin, UNISMUH Makassar, UIN Alauddin Makassar dan mahasiswa UNM	Memperingati 1 tahun pemerintahan SBY-Boediono, menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya.	Ratusan mahasiswa dari UNHAS, UNM, UNISMUH dan UIN menggelar aksi unjuk rasa dihari yang sama. Mereka menutup akses jalan raya dengan barisan massa dan kayu. Selain itu, para mahasiswa juga memalangkan sebuah mobil yang sebelumnya mereka sandera dari pengemudi, sehingga lalu lintas semakin lumpuh. Sekitar dua jam ratusan mahasiswa UNM saling melempar batu melawan personel Samapta dan Brimob Polda Sulselbar di Jalan A.P Pettarani yang kemudian disusul dengan aksi mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar bersama mahasiswa UNISMUH yang massanya terpusat di Jalan Sultan Alauddin. Lima polisi menjadi korban luka akibat lemparan batu dari mahasiswa.

	Depan pintu masuk kampus 45	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Universitas 45 Makassar	Menuntut SBY-Boediono untuk segera mundur dari jabatannya	Unjuk rasa dilakukan dengan cara berorasi, membakar ban bekas dan menutup separuh badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Mahasiswa merusak mobil dinas BLHD(Badan Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan dan terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
2012	Depan pintu 1 Kampus UNHAS Tamalanrea	Mahasiswa yang mengatasnamakan Lembaga Mahasiswa Nasional untuk Demokrat (LMND)	Penolakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Unjuk rasa dilakukan dengan berorasi, menahan mobil, terjadi aksi saling lempar antara mahasiswa dan aparat kepolisian, membakar ban bekas sehingga menyebabkan kemacetan panjang, menahan mobil type Xenia warna merah DD 231 AK milik Dinas Kehutanan SulSel, menahan mobil tangki milik PT. Pertamina DD 9460 AF dan

				<p>dipiloks serta seluruh mahasiswa pengendara beroda dua mengisi bahan bakar secara gratis di SPBU depan pintu 1 kampus UNHAS. Memecahkan mobil DD 9525 AQ milik PT. Aneka Mitra Gas yang mengangkut tabung gas kemasan 3 kg, para pengunjung rasa menurunkan sebagian tabung gas dari atas mobil kemudian membagikan kepada pengguna jalan dan Penumpang angkot yang melintas di TKP. Hal ini kemudian memicu terjadi bentrok antara mahasiswa dan kepolisian dan terjadi aksi saling melempar batu ke arah petugas kepolisian.</p>
<p>1. Depan kampus UIN Alauddin</p> <p>2. Pertigaan</p> <p>3. Jl.St.Alauddin-jl. A.P Pettranai</p> <p>4. SPBU pertamina Jl.Alauddin-Jl. Mannuruki</p>	<p>Mahasiswa UIN Alauddin, Mahasiswa UNISMUH Makassar dan Mahasiswa UNM</p>	<p>Menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 01 April 2012</p>	<p>Mahasiswa berorasi, menutup badan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan, bmemakar ban bekas,</p> <p>mahasiswa UNISMUH</p>	

	5. Rumah Makan Mc. Donald Jl. Sultan Alauddin			kemudian menduduki Mc. Donald sehingga terjadi bentrok dengan warga sekitar dan aparat kepolisian.
2013	Jl. Sultan Alauddin	Mahasiswa UNISMUH Makassar	Menolak kenaikan harga BBM	Terjadi aksi saling lempar batu antara mahasiswa Unismuh Makassar dengan warga sekitar. Kejadian ini dicurigai terjadi karena adanya provokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi bentrok selama beberapa jam. Sementara aksi saling lempar batu tak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menghentikan aksi tersebut. Aksi saling lempar batu tersebut berlangsung selama beberapa jam hingga larut malam.
	Jl. Rappocini Raya	BEM Universitas Indonesia Timur	Menolak kenaikan harga BBM	Terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian sehingga aparat kepolisian menembakkan <i>Water Canon</i> atau gas air

				<p>mata ke arah pengunjuk rasa. Aksi ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak efektif antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Mahasiswa bersikeras untuk melanjutkan unjuk rasa sedangkan aparat kepolisian beranggapan bahwa unjuk rasa harus dihentikan karena tidak memiliki ijin sehingga memaksa mahasiswa untuk membubarkan diri.</p>
2014	Fly over Jl. Urip Sumiharjo	<p>Lingkar Mahasiswa SulSel yang dipimpin saudara Ikhsan (Mahasiswa UIN Alauddin Fakultas Dakwah dan Komunikasi)</p>	<p>Menyikapi Pemerintahan Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM</p>	<p>Aksi unjuk rasa ini dilarang oleh aparat gabungan Polri dan TNI-AD dengan alasan tidak adanya Surat ijin dari Pihak kepolisian, namun para pengunjuk rasa tetap ingin melakukan aksinya sehingga terjadi adu mulut dan saling dorong dengan aparat kepolisian. TNI-AD mengamankan 12 orang pengunjuk rasa yang dianggap sebagai provokator.</p>

	Kampus 1 UIN Alauddin Makassar Jl.Sultan Alauddin Makassar	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya dipimpin oleh saudara Peri Herianto selaku ketua umum HMI Cabang Gowa Raya	Penganiayaan terhadap oknum mahasiswa dari HMI cabang Gowa Raya atas nama Saudara Hardiono yang terjadi pada hari Rabu 05 November 2014 oleh oknum aparat kepolisian dari Kesatuan Brimobda Polsa Sulsel	Pengunjuk rasa Yang dipimpin oleh saudara Peri Herianto selaku ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya menahan mobil container dan dijadikan panggung orasi dan menimbulkan kemacetan. Kapolrestabes Makassar mendatangi mahasiswa untuk melakukan negoisasi tapi mahasiswa tidak mau membubarkan diri dan tetap berorasi. Mahasiswa bersama warga terjadi bentrok dengan kepolisian yag menggunakan <i>Water Canon</i> atau semprotan air serta gas air mata dan berhasil mengamankan beberapa masyarakat dan mahasiswa
--	---	--	---	---

Sumber : Polrestabes Makassar

Tabel 4.5 Jumlah Unjuk Rasa Anarkis di Kota Makassar Tahun 2011-2014

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Isu Dominan
	2011	2	1 tahun pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono
	2012	11	Menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan menuntut SBY-Boediono mundur dari jabatannya.
	2013	5	Menolak kenaikan harga BBM
	2014	14	Menyikapi kebijakan Jokowi-JK menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sumber : Polrestabes Makassar

Dari tabel 4.4 dan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di sejumlah titik di kota Makassar yang berakhir anarkis sangat tinggi. Dari tabel 4.4 pula diketahui bahwa kegiatan unjuk rasa mahasiswa selalu berpusat di beberapa tempat yaitu Jalan A.P Pettarani, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Urip Sumiharjo. Hal ini dikarenakan 4 jalan tersebut merupakan kampus mahasiswa selaku pelaku dari unjuk rasa dalam hal ini yaitu UNISMUH dan UIN Alauddin yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Universitas Hasanuddin yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, serta UMI Makassar dan Universitas 45 Makassar yang berada di Jalan Urip Sumiharjo. Lokasi ke lima (5) kampus besar di Makassar yang tidak

begitu jauh menjadi salah satu tolak ukur maraknya tindakan anarkis dalam unjuk rasa. Aksi tindak anarkisme unjuk rasa itu sendiri kerap terjadi berkenaan dengan hari-hari besar seperti hari buruh, hari korupsi ataupun berkenaan kebijakan-kebijakanyang dikeluarkan pemerintah yang dianggap merugikan sebagian besar masyarakat.

Dari tabel 4.5 diatas maka diketahui bahwa pada tahun 2014 merupakan tahun dimana tindak anarkisme dalam unjuk rasa sangat sering terjadi yaitu sebanyak 14 kali dengan isu menolak kenaikan harga BBM, kemudian pada tahun 2012 juga marak terjadi tindak anarkisme dalam unjuk rasa yaitu sebanyak 11 kali dengan isu yang sama yaitu menolak kebijakan Presiden SBY-Boediono menaikkan harga BBM.

Harga bahan bakar minyak saat itu memang menjadi persoalan krusial. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, masyarakat kerap kali dihebohkan dengan usulan pemerintah unuk melakukan perubahan APBN yang menghendaki harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Kabar tentang akan dinaikkannya harga bahan bakar minyak bersubsidi ini telah menimbulkan berbagai opini dalam masyarkat. Ada yang menerima, namun banyak pula masyarakat yang keberatan jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Dampak utama dari kenaikan harga bahan bakar minyak adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Apabila kenaikan harga kebutuhan pokok ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pendapatan, maka tentunya akan semakin banyak rakyat miskin di Indonesia tak terkecuali di Kota Makassar.

Aksi anarkisme dalam unjuk rasa yang masih segar diingatan para aktivis kampus, masyarakat bahkan kepolisian adalah tragedi 27 November 2014 yaitu meninggalnya seorang warga bernama Muhammad Arief (17). Berikut kronologi tewasnya arief pada Demo BBM di Kota Makassar :

“Muhammad Arief, 17 tahun, menjadi korban aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Muslim Makassar (UMI) di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis 27 November 2014. Menurut juru bicaara kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Komisaris Besar Endi Sutendi, Arief adalah warga jalan Pampang 1, Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, tewas setelah kepalanya terbentur aspal. Kronologi kejadian versi polisi : pada pukul 15.45 unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dimulai. Saat itu, para pengunjuk rasa dari mahasiswa Universitas Muslim Indonesia mencoba menerobis masuk kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun, aparat kepolisian mencoba mencegahnya. Kemudian para pengunjuk rasa melempari petugas dengan batu. Polisi pun langsung membubarkan demonstran. Pada pukul 17,00 WITA, pengunjuk rasa kembali mendatangi kantor Gubernur. Mereka melempari kantor Gubernur. Kepolisian mencoba membubarkan paksa para pengunjuk rasa dengan gas air mata dan water cannon. Kemudian mereka lari dan berdesak-desakan. Arief, yang sehari-hari mencari uang dari mengatur lalu lintas (pak ogah), terjebak dalam kerumunan massa. Saat itulah Arief terjadi dan kepalanya terbentur aspal, kemudian terinjak oleh pengunjuk rasa. Polisi lalu membawa Arief ke Rumah Sakit Ibnu Sina. Pada pukul 18.45 Arief menghembuskan nafas

terakhir lantaran mengalami pendarahan. Kronologi versi mahasiswa : korban tewas karena tergilas mobil water cannon atau meriam air milik polisi. Saat itu, polisi sedang memukul mundur mahasiswa sehingga berlarian masuk kampus. Saat itulah, Arief tergilas.”²⁸

Dari kutipan kronologi anarkisme dalam unjuk rasa diatas, maka diketahui bahwa tindak anarkisme dalam kegiatan unjuk rasa sangat merugikan banyak pihak bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tindakan anarkis dalam unjuk rasa mahasiswa juga telah melenceng dari ajaran dan budaya yang dianut oleh masyarakat Makassar yaitu *Sipakatau*, *Sipakainga*’ dan *Sipakalabbiri* atau budaya *Siri’ na pace* yang bermakna sikap untuk saling menghargai dan menghormati harga diri masing-masing, serta saling mengasihi dan menyayangi. Tindakan anarkis dalam unjuk rasa menggerus dekadensi moral dimana seseorang menempatkan rasa malu tidak pada tempatnya. Kata-kata bijak *siri’ na pace* dalam bingkai *Sipakatau*, *sipakainga*’ dan *sipakalabbiri* harus dipergunakan dalam konteks positif. Bukan dalam bentuk perbuatan yang kurang terpuji seperti tindakan anarkis dalam unjuk rasa.

Peristiwa unjuk rasa yang anarkis sesungguhnya adalah pertanda tentang alpanya pemerintah sebagai penggerak roda pemerintahan, dan hadir terkesan hanya membawa perintah. Lahirnya unjuk rasa umumnya berawal dari pemerintahan (*government*) yang tidak berfungsi sebagai penggerak roda pemerintahan (*govermment*) oleh aparat kekuasaan. Inilah yang kemudian diterjemahkan oleh para pendemo untuk melakukan unjuk rasa yang anarkis.

²⁸ [Mediacenter.html#.VmQRhnpE_IU](#) (akses tanggal 5 November 2015)

Sebenarnya jika melihat tujuan akhir dari sebuah unjuk rasa, hanyalah penyampaian aspirasi kepada objek unjuk rasa, dalam banyak kasus adalah pemerintah. Unjuk rasa yang anarkis muncul bukan tanpa sebab, ibarat membangunkan harimau tuli yang sedang tidur, sangat sulit, membutuhkan tenaga ekstra dan tindakan di luar nalar, dan itulah anarkisme. Mungkin sudah menjadi apriori, jika unjuk rasa yang dilakukan tanpa tindakan anarkis, tak akan mampu menarik perhatian pemerintah. Hal ini kemudian diperparah dengan sikap pemerintah yang seakan memegang prinsip *“biarkan kafilah menggonggong, anjing tetap berlalu.”*. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan saudara Ardan Setyadi (aktivis HMI Cabang Gowa Raya), berikut :

“biasanya yang menjadi pikiran dari kebanyakan teman-teman mahasiswa ketika melakukan unjuk rasa adalah cara untuk menarik perhatian pemerintah terhadap isu yang kami tuntut ketika kami berunjuk rasa. Anarkis bisa dikatakan alat untuk menarik perhatian pemerintah, karena rata-rata unjuk rasa yang dilakukan dengan damai dan tertib tidak akan dipedulikan oleh pemerintah. Nanti setelah mahasiswa bertindak anarkis, bentrok dengan aparat kepolisian barulah ada media yang meliput dan mungkin ada beberapa pihak pemerintah yang tergerak untuk melihat atau hanya sekedar mendengar tuntutan kami.”

Dari kutipan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tindakan anarkis terkadang dilakukan oleh pengunjuk rasa khususnya pemerintah untuk menarik perhatian pemerintah.

Tindakan anarkisme unjuk rasa dan unjuk rasa yang besar juga dipengaruhi oleh karakter dan budaya suatu daerah. Di kota Makassar, kota yang

berasal dari bahasa Bugis-Makassar berarti “kasar”, tindakan anarkis adalah bukan hal baru lagi dalam setiap unjuk rasa; masyarakat pun tahu dan seakan sudah terbiasa, jika ada unjuk rasa, maka bersiaplah memiliki alternatif, karena unjuk rasa itu kerap anarkis. Pengaruh lain unjuk rasa adalah pelakon unjuk rasa yang rata-rata berjiwa muda, darah masih panas, dan sulit menggunakan rasio atau kepala dingin mereka.

Perilaku kekerasan atau tindak anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar juga bergantung pada pelaku yang terlibat di dalamnya. Tidak dapat serta merta kita membuat sebuah generalisasi bahwa seluruh mahasiswa di Kota Makassar suka berperilaku kasar karena sering unjuk rasa. Bahkan dalam unjuk rasa, terdapat dua kelompok yang dapat dibedakan menurut sifatnya, yakni kelompok aktif dan kelompok pasif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Tabel Sifat Pelaku Unjuk Rasa

No.	Kategori	Sifat Pelaku	
		Aktif	Pasif
1	Peran dalam unjuk rasa	Aktif mulai dari persiapan hingga pelaksanaan	Hanya partisipan atau ikut-ikutan
2	Pengetahuan akan isu	Mengetahui isu hingga mendalam	Mengetahui isu tapi tidak mendalam
3	Posisi dalam barisan massa	Barisan depan dan belakang	Barisan tengah dan belakang

4	Sikap ketika terjadi bentrokan	Awalnya bisa tenang namun kemudian akan keluar melawan	Reaksioner, atau berlari mengamankan diri
---	--------------------------------	--	---

Sumber : hasil analisis wawancara dengan rekan-rekan mahasiswa

Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 4 ketegori sifat mahasiswa dalam berunjuk rasa. Ada mahasiswa yang sekedar ikut-ikutan dengan teman-teman sesame mahasiswa untuk turun ke jalan tanpa mengetahui isu yang akan dibawa. Ada mahasiswa yang memahami isu secara mendalam dan menjadi barisan terdepan ketika terjadi anarkis. Ada mahasiswa yang ketika terjadi tindak anarkis memilih untuk melawan dan adapula yang memilih berlari menyelamatkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa yang turun ke jalan itu anarkis, kasar dan tidak bermoral seperti tanggapan masyarakat selama ini. Masih ada mahasiswa yang masih mengedepankan nalar mereka, memilih meninggalkan kegiatan unjuk rasa, dan adapula mahasiswa yang turun ke jalan dengan mengatasmakan solidaritas semata.

C. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Anakis Unjuk Rasa di Kota Makassar Tahun 2011-2014

Mengapa unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar selalu anarkis? Mungkin itu pertanyaan yang paling sering muncul dari berbagai kalangan. Untuk menjelaskannya tentu bukan perkara mudah. Kita harus melihat Kota Makassar dari berbagai aspek dan juga sejarah gerakan mahasiswanya.

Tingginya angka tindak anarkis dalam unjuk rasa di Kota Makassar sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat Kota Makassar bahkan di seluruh Indonesia. Yang masih segar diingatan masyarakat adalah peristiwa besar yang pernah terjadi di kampus UMI pada Mei 2004 yang dikenal dengan AMARAH, dimana terjadi bentrokan antara mahasiswa dan polisi hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa karena tindakan represif polisi yang mengejar mahasiswa sampai ke dalam ruang perkuliahan. Bahkan kegiatan perkuliahan yang sedang berjalan dibubarkan secara paksa oleh pihak kepolisian.

Makassar merupakan pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan, bahkan menjadi pusat pendidikan untuk wilayah tersebut. Semua pemuda-pemudi yang ingin melanjutkan jejang pendidikan ke perguruan tinggi harus merantau ke Makassar. Karena universitas negeri terbesar dan pertama di kawasan Indonesia Timur ada di Kota Makassar. Inilah yang menjadikan Kota Makassar sangat heterogen dari sisi kesukuan. Namun untuk fokus pembahasan bukan pada konflik kesukuan dalam mahasiswa di Kota Makassar, tetapi lebih pada pelaku unjuk rasa yang berawal dari gerakan mahasiswa dan factor-faktor penyebab terjadinya tindak anarkisme dalam kegiatan unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar.

1. Dendam Lama Antara Mahasiswa dan Pihak Kepolisian

Mahasiswa dan organisasi tak bisa dipisahkan, bagaikan 2 mata rantai yang selalu beriringan. Organisasi mahasiswa selalu diidentikkan sebagai wadah mahasiswa untuk melakukan pergerakan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya gerakan mahasiswa di Kota Makassar yang kemudian akan melahirkan aksi dan reaksi dalam menyikapi segala permasalahan

yakni unjuk rasa atau demonstrasi. Salah satu factor tersebut adalah factor internal yaitu factor yang mempengaruhi dan mendorong serta menjadi spirit gerakan mahasiswa yang bersumber dari dalam diri mahasiswa yang dinamakan *aktualisasi ilmu*. Selama mahasiswa mencari ilmu melalui bangku perkuliahan, bergelut dengan buku, konsep, wacana dan teori, maka perlu juga adanya sebuah aksi nyata yang kemudian dikomparasikan dengan realitas di masyarakat.

Kemudian pada konsep gerakan mahasiswa, apa yang dianut merupakan elemen dan spirit pendorong untuk melakukan advokasi terhadap nasib rakyat yang terpinggirkan. Gerakan mahasiswa akan menimbulkan eksistensi dari pergerakan kemahasiswa di Kota Makassar dengan sisi militan yang sangat kuat dan cenderung bersifat ideologis. Pergerakan mahasiswa Makassar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya telah marak disuarakan sebelum dan setelah momentum reformasi. Diantaranya dapat dilihat dari beberapa aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan tariff angkutan kota sebagai akibat dari naiknya harga BBM. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UNHAS.²⁹

“Ada beberapa tingkatan aksi (gerakan). Pertama, negoisasi (diplomasi), kemudian tuntutan (kampanye) dan terakhir pressure politik (menciptakan kecemasan politik)”

Dari kutipan di atas nampak jelas bahwa dalam melakukan pergerakannya mahasiswa memiliki beberapa metode yang kerap kali dilakukan. Namun ada satu hal dari pernyataan tersebut yang kemudian menjadi perhatian khusus. Mengenai

²⁹ Kusumandita Gilar Prawista. *Gerakan Mahasiswa Makassar*. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Fakultas Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik) 2011. Hal.54

metode ketiga dengan menciptakan kecemasan sosial. Apakah kemudian itu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang mengarah kepada bentuk anarkisme yang selama ini menjadi stigma mahasiswa di Kota Makassar?

“anak-anak UIN itu kalo demo sering bentrok apalagi itu kalo naik ki BBM pasti bentrok. Saya juga nda tau kenapa selalu bentrok. Tapi yang pasti kita ini semua selalu juga jadi korban. Banyak warung yang kena lemparan batu nyasar atau jadi tempat sembunyinya anak-anak UIN kalo terdesak mi.”³⁰

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa cenderung anarkis. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar memang terkenal keras bahkan cenderung nekat. Entah untuk menguji nyali atau nyali mereka yang memang sangat besar. Dapat dilihat dari aksi mahasiswa di Kota Makassar yang menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2012 dan tahun 2014 yang berimbas pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan hidup lainnya. Aksi mahasiswa dimulai dari orasi untuk menolak kenaikan harga BBM dengan melakukan diskusi hingga aksi turun ke jalan melakukan unjuk rasa.

Berdasarkan informasi dari kantor Polrestabes Kota Makassar, pada tanggal 5 November 2014 pukul 11.55 WITA, unjuk rasa yang mahasiswa di depan gedung Phinisi Kampus UNM Gunung Sari Jl. A.P. Pettarani Makassar yang dipimpin oleh saudara Syamsul (Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial) yang mengangkat isu penolakan terhadap kebijakan presiden Jokowi-JK untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) awalnya berlangsung damai.

³⁰ Wawancara dengan daeng Baso, pemilik warung dipinggiran jalan Sultan Alauddin depan Kampus 1 UIN Alauddin

Mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa dengan membentangkan spanduk panjang yang bertuliskan tentang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Lama kelamaan massa yang berkumpul semakin bertambah dengan berakhirnya jam kuliah dari beberapa mahasiswa yang kebetulan masih mengikuti perkuliahan. Unjuk rasa menyebabkan kemacetan karena menutup sebagian badan jalan. Aparat kepolisian yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa sudah bernegosiasi dengan koodinaor lapangan (korlap) agar tidak menutup jalan. Akan tetapi tidak diindahkan oleh mahasiswa. pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Rappocini KOMPOL. Ade Hermanto mengamankan empat (4) orang mahasiswa yang dianggap melakukan provokator pelemparan terhadap aparat kepolisian dan TNI-AD dengan menggunakan batu.

Gambaran peristiwa diatas merupakan salah satu peristiwa dari sekian banyak unjuk rasa mahasiswa yang berakhir bentrok dengan pihak kepolisian. Masih banyak peristiwa serupa yang terjadi dalam kurun tahun 2011-2014 seperti yang telah dijelaskan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5.

Fenomena bentrokan atau tindak anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar mulai membesar skalanya memasuki era reformasi. Sebenarnya unjuk rasa mahasiswa yang berujung dengan bentrokn antara mahasiswa dan polisi sudah terjadi sejak jaman dulu dan itu yang menjadi referensi mahasiswa saat ini. Namun untuk bentrokan yang terjadi pada jaman dulu bisa dikatakan karena tekanan penguasa orde baru yang amat sangat kuat terhadap pergerakan mahasiswa. bahkan bisa dikatakan adanya aturan yang melegalkan pihak keamanan, dalam hal ini polisi untuk menindak tegas para

pendemo dengan cara kekerasan. Untuk aksi unjuk rasa saat ini yang berakhir dengan bentrokan lebih mengarah pada perilaku destruktif.

Dari sejarah panjang tentang pergerakan mahasiswa di Kota Makassar, memang konflik antara mahasiswa dengan militer dalam hal ini polisi sangatlah kental. Peristiwa AMARAH pada tahun 1996, ketika itu polisi masih menjadi bagian dari TNI, menjadi peristiwa bentrokan terbesar yang sampai saat ini masih dikenang oleh para aktivis dan meninggalkan dendam lama antara mahasiswa dan polisi. Selain itu, masih banyak lagi kasus bentrokan antara mahasiswa dengan pihak kepolisian akibat dari unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. pastinya setiap kejadian memunculkan dendam diantara keduanya. Di sisi mahasiswa sendiri, dendam sebagai mahasiswa kepada polisi terus dipelihara melalui doktrin-doktrin terhadap mahasiswa baru.

*“dulu pas masih menjadi mahasiswa baru, saya sering ikut kajian-kajian yang dilakukan oleh senior-senior dikampus. Banyak mendengar cerita tentang kerusuhan pas reformasi. Polri seaneak-enaknya menembak mahasiswa yang Cuma bisa melawan pakai batu. Itu yang bikin saya jadi sedikit emosi kalau pas demo dengan orasi kita langsung dipaksa untuk bubar oleh polisi”.*³¹

Oleh penjelasan tersebut, factor yang menjadi penyebab (*underlying causation*) terjadi perilaku kekerasan atau tindak anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa, yakni sikap primordialisme mahasiswa terhadap komunitasnya dan menciptakan *stereotype* buruk terhadap pihak kepolisian. Selain itu juga kurangnya *social control* dari para petinggi kampus dalam menindak mahasiswa

³¹ Wawancara dengan Ilham, mahasiswa Fakultas Ushuluddin pada tanggal 21 september 2015

yang terlibat langsung dalam bentrokan. Kemudian mulai lunturnya nilai yang mengikat, seperti *idealism*, tanggung jawab sosial, kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Sulawesi Selatan yaitu budaya *Siri' na pace* sudah hampir terkikis sehingga perilaku anarkis menjadi satu-satunya solusi dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya sebagai mahasiswa bisa lebih cerdas dalam menanggapi sikap aparat kepolisian yang kadang dituntut untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

Stereotype yang dibangun dan diberikan mahasiswa kepada aparat kepolisian menjadi factor utama yang ada. Stereotype ini mengantarkan kelompok mahasiswa merupakan kelompok yang benar sedangkan kelompok yang lain itu salah. Mahasiswa menganggap polisi merupakan alat dalam melanggengkan kekuasaan elit, sedangkan polisi sendiri melihat mahasiswa sebagai kelompok yang ketika melakukan unjuk rasa dapat mengganggu ketertiban umum dan wajib untuk ditindak. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya “dendam lama” menjadi salah satu pemicunya.

2. Perbedaan Pemahaman Mengenai Unjuk Rasa Antara Mahasiswa dan Kepolisian

Penyebab terjadinya tindakan anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa dengan aparat kepolisian tidak berhenti pada adanya “dendam lama” diantara keduanya. Perbedaan pemahaman terhadap aturan yang mengatur tentang menyampaikan pendapat di depan umum juga menjadi salah satu factor terjadinya tindakan anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

Mahasiswa memahami bahwa aturan tentang kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat termasuk dalam melakukan unjuk rasa dan surat kepada kepolisian hanyalah bersifat pemberitahuan atau formalitas, bukan ijin untuk melakukan unjuk rasa. Sedangkan dari pihak kepolisian sendiri memahami penyampaian pendapat di muka umum tersebut berlaku di dalam suatu forum khusus dan bukan berbentuk unjuk rasa. Ketika akan melakukan unjuk rasa maka wajib terlebih dahulu meminta ijin ke kepolisian dan polisi yang menentukan boleh atau tidaknya mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan menyertakan surat keterangan dari RT/RW setempat. Berikut kutipan hasil wawancara dengan kapolrestabes Kota Makassar.

“Seharusnya mahasiswa masukkan ijin dulu sebelum mau aksi. ijin itu juga harus ada surat keterangan dari pihak di sekitar kampus termasuk rector. Kalau itu tidak ada, kita sebagai polisi akan langsung menindak mahasiswa karena sudah mengganggu ketertiban umum yang merupakan tindakan kriminal.”³²

Perbedaan pemahaman itu juga berlaku di lapangan saat terjadi unjuk rasa. Mahasiswa yang memahami kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dengan kebebasan berekspresi dengan cara apapun memilih untuk menutup jalan untuk menarik perhatian publik. Bukan sekedar menutup jalan, bahkan sampai membakar ban bekas di tengah jalan. Di pihak kepolisian sendiri menganggap tindakan tersebut merupakan tindakan criminal mengganggu ketertiban umum dan harus ditindak tegas dengan membubarkan unjuk rasa tersebut.

³² Wawancara dengan kapolrestabes Kota Makassar (tanggal 13 November 2015)

*“menutup jalan dengan membakar ban bekas hingga membuat kemacetan itu sebuah tindakan criminal karena sudah mengganggu ketertiban umum. Makanya sebisa mungkin polisi harus menindaknya. Andai mereka tidak menutup jalan polisi juga tidak akan ada tindakan tega.”*³³

Mahasiswa yang merasa belum tercapai tujuannya dalam menyampaikan aspirasi, berusaha melawan dengan semampu mereka. Frsutasi itu muncul dengan stimulant dari tindakan represif polisi.

*“Pada dasarnya tidak ada yang namanya demonstrasi negative/buruk/jelek. Demonstrasi hakekatnya mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi masyarakat . ketika ada yang dianggap buruk mungkin ketika terjadi pengrusakan. Hal ini terjadi tidak lain dari sifat represif masyarakat itu sendiri atau pihak kemanan/ kepolisia sehingga terjadi penutupan jalan dan juga tindakan represif kepolisian yang menganggap mahasiswa hanya membuat jalanan macet sehingga memancing tindak anarkis para pengunjung rasa.”*³⁴

Dilanjutkan dengan tanggapan dari rekan mahasiswa lainnya yaitu :

“terkadang aparat kepolisian dalam hal ini ketika unjuk rasa sedang berlangsung selalu memancing amarah para pengunjung rasa yang menganggap bahwa ketika aksi demontrasi yang dilakukan dibeberapa titik di Kota Makassar tidak tepat sasaran. Misalnya, ketika unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman dari HMI Cabang Gowa Raya mengenai ijazah palsu yang diduga

³³ Wawancara dengan Kepala Bagian Operasi Polrestabes Kota Makassar

³⁴ Wawancara dengan Breges, aktivits HMI Cabang Gowa raya (tanggal, 15 november 2015)

dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Takalar yang dilakukan di Jalan Sultan Alauddin Makassar, pihak kepolisian melarang melakukan unjuk rasa karena masalah tersebut tidak berada dalam lingkup wilayah Kota Makassar. Sedangkan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tidak menjelaskan bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum harus diwilayah yang menjadi lokasi masalah atau isu itu terjadi. Hal inilah yang sebenarnya memancing terjadinya gerakan yang tidak diharapkan masyarakat yang diakibatkan tindakan represif kepolisian yang berlebihan.”³⁵

Dari kutipan wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kesalahpahaman antara mahasiswa dengan aparat kepolisian menjadi pemicu terjadinya tindakan anarkis. Keteguhan hati mahasiswa yang enggan beranjak dari lokasi unjuk rasa dengan alasan belum tercapai tujuan mereka dalam menyampaikan aspirasi itu memancing insting kepolisian secara alami untuk melakukan pertahanan. Akan tetapi, terkadang maksud untuk mempertahankan diri malah jadi berlebihan yang kemudian berubah menjadi maksud memukul mundur mahasiswa. dan pada akhirnya agresi kekerasan dari kedua belah pihak pecah yang kemudian menjadi sebuah bentrokan massal antara polisi dan mahasiswa. Fungsi pengamanan dari aparat kepolisian melenceng dan berakhir dengan menangkap para pelaku penyerangan hingga akhirnya mengejar mahasiswa bahkan sampai ke dalam kampus seperti yang pernah terjadi dengan mahasiswa UNM setahun silam yang sampai saat ini dikenal dengan “INSTING”. Stimulus lingkungan dalam kondisi ricuh tersebut, mahasiswa yang pada awalnya

³⁵ Wawancara dengan narasumber Gunawan aktivis HMI Cabang Gowa Raya

tidak ikut dalam unjuk rasa melihat teman-teman satu almamater mereka sedang “berperang” melawan polisi, akhirnya ikut membantu dengan dalih mempertahankan kampus dari serangan polisi.

Ada beberapa yang harus menjadi sebuah bahan evaluasi bagi gerakan mahasiswa Makassar dimana pola aksi dengan membentuk aliansi gerakan mahasiswa Makassar dimana pola aksi dengan membentuk aliansi gerakan yang bersifat dalam setiap menyikapi suatu isu menjadikan gerakan mahasiswa Makassar cenderung parsial. Ditambah lagi dengan jumlah benturan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian atau keamanan kampus serta beberapa anggapan kajian isu tidak usah terlalu mendalam yang penting bergerak menjadikan mahasiswa Makassar terkenal dengan gerakan yang keras/radikal.

Melihat fenomena bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian saat dan pasca unjuk rasa mahasiswa dengan mengadopsi pandangan mengenai agresi dari Berkowitz (1993) yang berpendapat bahwa berdasarkan tujuannya, agresi dikelompokkan menjadi agres instrumental (*instrumental aggression*) dan agres kebencian (*hostile aggression*). Agresi instrumental berupa agresi untuk mencapai tujuan, keinginan atau harapan tertentu. Sedangkan agresi kebencian lebih pada masalah agresi yang bertujuan untuk menyakiti, membunuh atau menghancurkan lawan.

Pada awal melakukan unjuk rasa, mahasiswa melakukan tindakan agresi yang digolongkan pada agresi instrumental dengan mengusung suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk *pressure* atas kebijakan yang ada. Harapannya kebijakn

tersebut dibatalkan ataupun diganti dengan kebijakan yang lebih memihak kepada rakyat, mengingat gerakan mahasiswa merupakan *moral force* sebagai penyambung lidah rakyat kepada pemerintah. Namun jangan juga mengabaikan nilai historis yang ada dalam dinamika gerakan mahasiswa Makassar. Dalam diri mahasiswa telah tertanam sikap kebencian kepada aparat kepolisian melihat sisi sejarah bentrokan antara mahasiswa dengan polisi. Oleh karena itu, selain digolongkan dalam agresi instrumental, aksi unjuk rasa mahasiswa juga rentan dengan agresi kebencian. Hanya butuh sedikit penyulut untuk memunculkannya lagi.

Kedua bentuk agresi tersebut bukan hanya berlaku pada mahasiswa, tapi juga pada pihak kepolisian yang datang ke lokasi unjuk rasa dengan tujuan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa (agresi instrumental) yang kemudian dapat berubah dengan melihat sisi sejarah bentrokan dan *stereotype* yang terbangun oleh kedua pihak (agresi kebencian). Maka ketika aparat kepolisian berusaha untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, mahasiswa yang merasa aksinya dihalangi oleh aparat kepolisian berusaha melawan. Agresi kebencian antara mahasiswa dan polisi inilah yang akhirnya menjadi pemicu terjadinya bentrokan.

3. Tindakan Represif dari Pihak Kepolisian Yang Memancing Amarah Para Pengunjuk Rasa

Dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat kepolisian dalam mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa mahasiswa diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, memang tidak mengatur kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa tetapi dalam UU No. 2 Tahun 2002 terdapat pasal-pasal yang dapat diimplementasikan sebagai kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa. Pasal tersebut adalah Pasal 13 tentang tugas dan wewenang polisi, dalam Pasal 13 tersebut menyebutkan tugas dan wewenang polisi adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dalam ketiga tugas dan wewenang polisi tersebut yang terdapat pada Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 dapat dikaitkan dengan UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Tugas dan wewenang polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No.9 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa “dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakkan hukum, pada tugas dan wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal (1), UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 16 menyatakan bahwa “Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di

muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah sesuai dengan tugas Polisi sebagai penegak hukum.

Hal tersebut diatas yang menjadi landasan pihak kepolisian dalam mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa mahasiswa. Akan tetapi, seringkali dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian bertindak represif sehingga memancing kondisi semakin “panas”. Tindakan represif pihak kepolisian yang dinilai oleh mahasiswa menghalangi jalannya unjuk rasa memancing emosi para pengunjuk rasa dan beranggapan bahwa tujuan yang ingin mahasiswa sampaikan tidak tercapai.

Dengan tidak tercapainya tujuan dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan adanya tindakan represif dari aparat kepolisian, maka menumbuhkan perilaku frustrasi yang kemudian menjadi perilaku agresi mengarah pada tindakan kekerasan, seperti melempari polisi dengan batu, potongan kayu dan segala macam benda keras yang ada di sekitarnya dengan alasan polisi telah menghalangi aksi mereka yang sebenarnya demi kepentingan rakyat.

Dalam bentrokan atau tindakan anarkis dalam unjuk rasa tentunya menimbulkan kerusakan fisik. Kerusakan fisik yang paling nyata ialah rusaknya sarana dan prasarana kampus dan umum akibat terkena lemparan batu, potongan kayu dan lain-lain. Selain itu, korban dari kedua pihak juga sering berjatuhan, luka ringan, luka berat hingga meninggal. Akibat-akibat yang ditimbulkan pasca bentrokan tersebut menjadi sebuah dendam yang tertanam. Dendam tersebut

bukan milik individu, melainkan menjadi dendam secara kolektif antara mahasiswa dan kepolisian.

4. Tidak Adanya Sanksi Tegas Terhadap Pelaku Tindak Anarkis Unjuk Rasa

Asumsi lainnya yang tidak kalah kuat adalah jika dilihat dari actor-aktor yang sering terlibat dalam bentrokan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa salah satu hal yang paling mungkin terjadi adalah pemberlakuan norma yang kurang tegas atau berimbang dengan tindakan yang telah dilakukan. Dampak yang ditimbulkan dari bentrokan antara mahasiswa polisi hingga masyarakat cukup besar, selain korban jiwa, harta benda dan juga fasilitas umum ikut rusak. Tetapi sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Seharusnya pihak universitas menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap mahasiswa pelaku tindak anarkis dalam unjuk rasa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak sesuka hati bertindak dalam setiap kegiatan unjuk rasa. Sanksi yang dapat diterapkan misalnya sanksi akademik. Mahasiswa setidaknya mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelesaikan studi mereka masing-masing. Sehingga dengan diberlakukannya sanksi akademik yang tegas maka mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa merasa sungkan atau enggan jika harus bertindak anarkis.

Sanksi tegas juga seharusnya berlaku terhadap pihak kepolisian bukan hanya kepada mahasiswa. Selama ini, sanksi tegas lebih sering menimpa pucuk pimpinan daerah. Selama ini, sudah dua kali kepala kepolisian Daerah (Kapolda)

Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) dimutasi akibat tindakan represif yang dilakukan para anggotanya dalam menangani unjuk rasa mahasiswa. Namun itu tidak berlaku bagi jajaran bawah yang melakukan tindakan secara langsung. Hal ini tentu saja tidak efektif karena pada dasarnya bukan pucuk pimpinan kepolisian yang melakukan tindakan represif. Yang melakukan tindakan represif adalah para jajaran bawah anggota kepolisian. Sehingga dengan diberlakukannya sanksi tegas terhadap para pelaku tindak represif terhadap pelaku unjuk rasa maka sedikit mengurangi tindakan anarkis yang terjadi disetiap unjuk rasa.

Selain penerapan sanksi tegas terhadap mahasiswa dan pihak kepolisian, sanksi tegas juga seharusnya diberlakukan terhadap masyarakat yang ikut melakukan tindakan anarkis. Bentrok atau tindakan anarkis dalam kegiatan unjuk rasa bukan hanya antara pihak kepolisian dan mahasiswa, seringkali juga terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat. Sehingga dibutuhkan sanksi tegas terhadap masyarakat. Sanksi tegas yang untuk masyarakat yaitu adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk menangani masyarakat yang melakukan tindakan anarkis. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai efek jera untuk terlibat langsung dalam tindakan anarkis unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa.

5. Jumlah Mahasiswa Pengunjuk Rasa Yang Besar

Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa seringkali melibatkan jumlah massa yang tidak sedikit terutama jika menyangkut isu nasional misalnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menyikapi pemerintahan Presiden, hari anti korupsi dan hari buruh. Jika mahasiswa melakukan unjuk rasa karena tuntutan isu nasional hampir seluruh mahasiswa di setiap perguruan tinggi di Kota

Makassar bahkan di seluruh Indonesia turun ke jalan menyuarakan tuntutan atau aspirasi mereka dengan mengatas namakan aspirasi rakyat.

Begitu susahnyanya menciptakan suasana demo yang aman dan kondusif yang ketika unjuk rasa dilakukan dengan jumlah massa yang amat besar dan terjadi setiap hari dengan intensitas aksi perhari lebih dari satu kali. Dengan demikian begitu rentannya terjadi bentrok atau tindakan anarkis dari kedua belah pihak dari massa pengunjung rasa yang sarat akan provokasi dan emosi dengan aparat kepolisian yang merasa tak dapat mengendalikan massa pengunjung rasa.

Kegiatan unjuk rasa melalui mobilisasi kekuatan massa yang besar mudah terbentuk dengan muatan jiwa agresi dan emosional. Yaitu ketika orang-orang sudah berkumpul untuk hal-hal tertentu dimana kita sudah memberikan peluang bagi tindakan agresif kelompok tersebut, yang bertindak menentang dan melakukan aksi, maka mustahil kelompok tersebut akan terkontrol dan terkendali.

Dengan jumlah massa yang besar maka emosi dari pengunjung rasa juga tidak bisa terkontrol sehingga rentan terjadinya tindakan anarkis. Jumlah massa yang besar juga rentan terprovokasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

6. Rasa Tidak Puas Para Mahasiswa

Tindakan anarkis yang dilakukan para mahasiswa pengunjung rasa juga dapat disebabkan oleh adanya rasa tidak puas dalam diri mahasiswa yang muncul. Rasa tidak puas ini dapat diakibatkan karena tidak adanya perwakilan dari obyek isu yang mereka bawaikan.

Para mahasiswa pengunjuk rasa beranggapan bahwa mereka tidak diacuhkan dan aspirasi mereka tidak didengar karena itu mereka mencari perhatian dengan melakukan aktivitas yang dapat merugikan masyarakat misalnya membakar ban bekas atau menutup badan jalan yang dapat memancing terjadinya bentrok atau tindakan anarkis.

Tindakan anarkis bisa saja dihindari dengan hadirnya perwakilan dari pemerintah atau obyek isu yang mereka bawaan, berbicara secara persuasive kepada mahasiswa pengunjuk rasa sehingga mereka juga merasa puas dan tidak bertindak diluar kendali.

Dari pembahasan mengenai faktor-faktor terjadinya tindak anarkis dalam unjuk rasa mahasiswa diketahui bahwa tindakan anarkis yang terjadi pada kegiatan unjuk rasa mahasiswa tidak sepenuhnya bersumber dari mahasiswa. ada factor-faktor yang datang dari pihak lain yang dapat memancing terjadinya tindakan anarkis. Dan segala upaya yang dapat mencegah terjadinya tindak anarkis hendaknya dilakukan karena tindak anarkis yang terjadi pada kegiatan unjuk rasa merugikan banyak pihak. Tidak hanya masyarakat, pemerintah pun mengalami kerugian karena harus bekerja ekstra untuk menangani akibat dari tindak anarkisme tersebut. Mahasiswa pun harus ikut menangani akibat dari tindak anarkisme unjuk rasa tersebut.

Unjuk rasa yang baik adalah unjuk rasa yang tetap mengedepankan etika seperti dalam budaya Bugis-Makassar *siri'na pace* yang menjadi landasan masyarakat Bugis-Makassar dalam kehidupan sehari-hari. Unjuk rasa yang baik adalah ketika apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa didengar oleh para

petinggi-tinggi Negara sehingga menciptakan kondisi yang kondusif. Karena sejatinya unjuk rasa dilakukan adalah untuk menciptakan keseimbangan bukan kesenjangan, membawakan aspirasi masyarakat bukan menyengsarakan masyarakat, bentuk perhatian masyarakat kepada pemerintah dan wadah pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagaimana hakekat demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unjuk Rasa

1. Praktek Demonstrasi Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Sejarah mencatat bahwa unjuk rasa atau demonstrasi pernah terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memang dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat populis. Saat ia masuk (awal) Islam, Utsman bin Affan naik menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab lewat prosedur formatur.³⁶

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan rakyat pada saat itu karena kebijakan-kebijakan Utsman yang dinilai controversial. Sehingga banyak yang mengkritik dan melakukan pemberontakan untuk menurunkan Utsman dari kekhalifahan. Sebagian ahli sejarah menilai, bahwa Utsman melakukan nepotisme. Ia mengangkat sanak saudarnya, dalam jabatan-jabatan strategis yang paling besar dan paling banyak menyebabkan suku-suku dan kabilah-kabilah lainnya merasakan pahitnya tindakan Utsman saat itu.³⁷

³⁶ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok : Gramata Publishing, 2010), hal.93

³⁷ M. Abdul karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007), hal.91.

Salah satu tindakan atau kebijakan Utsman yang mengakibatkan banyak protes (demonstrasi) serta meluasnya oposisi yaitu kebijakan baru tentang tanah. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang jauh berbeda dengan para pendahulunya (Abu Bakar dan Umar). Dia mengadopsi sebuah kebijakan baru pada tahun 30 H.³⁸ yaitu jika seorang penduduk Hijaz memiliki kekayaan di wilayah yang ditaklukkan, dibolehkan baginya untuk mengganti kekayaan itu dengan kekayaan yang ada di daerahnya. Alasannya, dalam pandangan Utsman, hal ini ditunjukkan untuk mengurangi tekanan dari beberapa Badui dan budak-budaknya melahirkan banyak problema sosial.

Kebijakan ini disambut gembira oleh penduduk Hijaz. Namun izin untuk menukarkan tanah merupakan sebilah pedang yang bermata dua. Para sahabat yang memiliki tanah-tanah di Hijaz mulai menjual tanaah-tanah mereka dan membeli tanah-tanah baru di berbagai provinsi. Thalhah, misalnya, membeli banyak tanah dari pemiliknya yang berada di Hijaz. Kebijakan ini telah melahirkan kelas-kelas elit pemilik tanah dan tuan tanah.

Orang-orang Quraisy terkemuka yang sebelumnya hanya berkutat di Makkah akibat kebijakan Umar, kini menyebar ke berbagai Negara Islam di dunia dan mereka menjadi sumber-sumber penderitaan. Orang-orang kecil pemilik tanah menjual tanah mereka kepada para pemilik modal, yang bisa menginvestasi sejumlah uang yang dimilikinya. Orang seperti Thalhah, Zubair, Marwan bin Hakam membeli tanah dengan jumlah yang besar akibat adanya dispensasi ini.

³⁸ Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, Penerjemah; Samson Rahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000) hal. 180.

Negara yang semula berdasarkan persaudaraan dan persamaan kini tampaknya mulai mengalami pergeseran karakter. Para elit baru mulai mengeksploitasi orang miskin dan mencari kekuasaan dan pengaruh lewat kekayaan dan kemakmuran yang mereka miliki. Maka tidaklah heran jika orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal, secara terang-terangan di depan public memprotes keras tindakan eksploitasi orang-orang kaya atas orang-orang miskin.

2. Pendapat Para Ulama Tentang Demonstrasi

Dalam perspektif Islam, kata demonstrasi memang tidak disebutkan secara eksplisit/jelas dalam Al-Qur'an. Akan tetapi prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar. Kata *amar ma'ruf nahi munkar* dalam istilah fiqh biasa disebut dengan istilah "*Al-Hisbah*". Dengan demikian secara sederhana maksud istilah "*Amar Ma'ruf nahi Munkar*" yang telah meng-Indonesia tersebut adalah menyerukan kebajikan dan mencegah kemunkaran.³⁹

Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu kewajiban yang berbobot besar.⁴⁰ *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah bagian dari syarat Islam yang paling agung dan sarana yang paling ampuh untuk menjaga agama dan memelihara kehormatan. Kewajiban ini tergantung kepada kemampuan kita untuk melakukannya, serta mempertimbangkan adanya masalah yang lebih besar.

Oleh karena itu, tidak aneh jika mendapatkan para pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin dengan sungguh-sungguh memerintahkan rakyatnya untuk

³⁹ Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI; Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Ibun Sudah, 2008), Cet. II, hal.36

⁴⁰ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001). Hal 256.

mengkritik (berdemo) dan berposisi kepada mereka (para pemimpin). Apabila mendapatkan dalam tindakan-tindakan mereka hal-hal yang menuntut kea rah tersebut.⁴¹ Arah yang membawa kepada kemunkaran.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS al-Imran/03:104)

Menurut Ibnu Qudamah di dalam ayat tersebut terkandung penjelasan, bahwa tugas ini merupakan fardhhu kifayah bukan fardhhu a'in. Sebab Allah berfirman. “hendaklah ada diantara kalian segolongan umat”, dan tidak difirmankan, “Jadilah setiap orang di antara kalian yang menyuruh kepada yang ma'ruf.” Jika sudah ada yang melaksanakannya, berarti yang lain sudah terbebas dari tugas tersebut. Namun ada keberuntungan yang khusus dan kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Dan juga Allah swt, mewajibkan sekelompok ummat untuk menggeluti urusan ini, meskipun setiap pribadi wajib melakukan tugas ini sesuai dengan kemampuan.

Dalam demonstrasi bisa dikatakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi umat dan mengkritik pemerintah. Apabila pemerintah tidak dapat menampung aspirasinya dan menyimpang dari ajaran dan syari'at Islam dalam menjalani

⁴¹ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, oposisi dan masyarakat madani*, (Bandung : Mizan, 1996), hal.135

tugasnya sebagai kepala Negara. Dalam hal ini banyak sekali pendapat para tokoh dan ulama muslim mengenai hukum melakukan demonstrasi/kritik terhadap pemerintah.

Menurut Imam Ghazali melaksanakan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya adalah *fardhu a'in* atas setiap orang. Tugas *amar ma'ruf nahi munkar* adalah bentuk yang tegas dari perasaan tanggung jawab terhadap keselamatan moralnya bangsa, dan karenanya dia adalah termasuk akhlak yang utama. Di samping itu, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah juga menjadi “benteng moral” yang menjaga dan mempertahankan segala akhlak-akhlak yang baik yang harus menjadi watak dan kepribadian bangsa dan Negara.⁴²

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani melakukan koreksi (demokrasi) terhadap penguasa hukumnya adalah *fardhu*. Dan makna ketaatan kepada mereka sekalipun mereka berbuat zhalim dan merampas hak rakyat itu bukan berarti harus mendiamkan mereka. Tetapi mentaati mereka hukumnya wajib, sedangkan melakukan koreksi terhadap mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib. Jika penguasa memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan maka sudah adanya kekufuran yang nyata. Kalau kekufuran yang nyata itu benar-benar telah nampak, maka wajib diperangi.⁴³

Pada intinya, demonstrasi bukan bermaksud menentang atau mengangkat senjata menghadapi pemerintah. Ia adalah sebagai salah satu cara untuk menasihati pemerintah dan mencegahnya dari terus melakukan mungkar serta

⁴² Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), cet. I, hal,233s

⁴³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ; Doktrin, Sejarah dan realitas Empirik*, hal.347

ketidakadilan terhadap rakyat. Tanpa adanya hak ini (demonstrasi), orang tidak dapat melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar dengan baik sebagai salah satu cermin ketakwaan.

Maka boleh melakukan kritik (unjuk rasa atau demonstrasi) kepada penguasa/pemerintah apabila mereka telah melakukan penyelewengan dari tugas-tugas yang sudah diberikan kepadanya dan mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan ummat Islam (keluar dari ajaran Islam). Maka dalam agama Islam dibolehkan untuk melakukan kritik ataupun nasehat dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dengan catatan diniatkan untuk menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*.

Menurut perspektif NU, melakukan unjuk rasa atau demonstrasi itu dibolehkan. Asalkan dalam unjuk rasa tersebut bermuatan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mencari kebenaran dan mencari keadilan. Akan tetapi ada beberapa hal yang mesti di ingat dalam melakukan unjuk rasa tersebut. Salah satunya ialah :

- a. Tidak menimbulkan masalah yang besar
- b. Sudah tidak ada jalan seperti menempuh musyawarah atau lobi.
- c. Apabila ditujukan pada pemerintah, hanya boleh dilakukan dengan cara *ta'tif* (menyampaikan penjelasan) dan *al-wa'zhu* (pemberian nasehat).

3. Hak dan Kewajiban dalam Melakukan Demonstrasi Menurut Perspektif Islam

Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 5 tertulis dengan jelas. Bahwa seseorang yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan melakukan unjuk

rasa atau demonstrasi, pawai rapat umum atau mimbar bebas bagian dari hak sebagai warga Negara. Oleh karena itu, siapapun bisa menggunakan hak ini.

Dalam muatan Pasal 5 tersebut tertulis jelas bahwa mengeluarkan pikiran secara bebas diakui oleh Negara. Lebih dari itu, Negara memberikan perlindungan hukum kepada warga Negara yang menggunakan hak ini. Hak ini bisa digunakan oleh siapa saja baik dari kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat kalangan atas.

Dalam pandangan Islam, juga diatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat atau pikirannya, ketika Islam datang, dunia pada saat itu dipenuhi perbudakan, manusia diperbudak dalam pikirannya, politiknya, system kemasyarakatannya maupun keagamaannya. Islam kemudian mengubah semuanya dengan mengikrarkan kemerdekaan, baik kemerdekaan beriktikad, kemerdekaan berpikir, kebebasan berbicara dan kebebasan mengemukakan pendapat. Kesemuanya itu merupakan kemerdekaan dan kebebasan saling penting yang dicari dan didambakan manusia.

Menurut perspektif Islam, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dianggap yang paling besar dan termasuk kewajiban. Maka bukan sekedar masalah hak dan kebebasan. Setiap orang yang melihat kemunkaran yang nyata, maka dia harus mencegahnya selagi dia sanggup melakukannya. Dengan kebebasan ini ummat bisa mengoreksi penguasa apabila penguasa telah melakukan tindakan yang munkar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan unjuk rasa di Kota Makassar pada tahun 2011-2014 marak terjadi dan beberapa kasus unjuk rasa berakhir anarkis terutama jika isu yang menjadi tuntutan para mahasiswa merupakan isu nasional misalnya kenaikan Bahan Bakar Minyak.
2. Tindakan anarkis pada unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu :
 - a. Dendam lama antara mahasiswa dan pihak kepolisian
 - b. Perbedaan pemahaman mengenai unjuk rasa antara mahasiswa dan kepolisian.
 - c. Tindakan represif dari pihak kepolisian yang memancing amarah para pengunjuk rasa.
 - d. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku tindak anarkis unjuk rasa.
 - e. Jumlah mahasiswa pengunjuk rasa yang besar.
 - f. Rasa tidak puas para mahasiswa

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya tindakan anarkisme dalam unjuk rasa mahasiswa dengan melibatkan seluruh komponen yang berperan didalamnya yaitu mahasiswa, aparat kepolisian dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menghindari segala factor penyebab terjadinya tindak anarkisme, membangun komunikasi antara pemerintah dan pengunjuk rasa sehingga tidak terjadi tindak anarkis dalam kegiatan unjuk rasa.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, Penerjemah; Samson Rahman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2000.

Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI; Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Pustaka Ibun Sudah, 2008.

Allen F. Davis dan Harold D. Woodman, *Konflik dan Konsensus Dalam Sejarah Amerika Modern*. Yogyakarta, 1991.

Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, oposisi dan masyarakat madani*, Bandung : Mizan, 1996.

Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang : Lintas Media.

Kusumandita Gilar Prawista. *Gerakan Mahasiswa Makassar*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Fakultas Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik, 2011.

M. Abdul karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007.

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta, 2001.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ; Doktrin, Sejarah dan realitas Empirik*,

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok : Gramata Publishing, 2010

Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

Wawancara dengan daeng Baso, pemilik warung dipinggiran jalan Sultan Alauddin depan Kampus 1 UIN Alauddin

Wawancara dengan Ilham, mahasiswa Fakultas Ushuluddin pada tanggal 21 september 2015

Wawancara dengan kapolrestabes Kota Makassar, tanggal 13 November 2015.

Wawancara dengan Kepala Bagian Operasi Polrestabes Kota Makassar

Wawancara dengan Breges, aktivits HMI Cabang Gowa raya, tanggal, 15 november 2015.

Wawancara dengan narasumber Gunawan aktivis HMI Cabang Gowa Raya

Kusumandita Gilar Prawista, *Gerakan Mahasiswa Makassar*, Surakarta , 2011.

Wawancara dengan daeng Baso, pemilik warung dipinggiran jalan Sultan Alauddin depan Kampus 1 UIN Alauddin

Wawancara dengan Ilham, mahasiswa Fakultas Ushuluddin pada tanggal 21 september 2015

Wawancara dengan kapolrestabes Kota Makassar, tanggal 13 November 2015.

Wawancara dengan Kepala Bagian Operasi Polrestabes Kota Makassar

Wawancara dengan Breges, aktivits HMI Cabang Gowa raya, tanggal 15 november 2015.

Wawancara dengan narasumber Gunawan aktivis HMI Cabang Gowa Raya

Yayan Sopyan, *Tarikh Tasri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok, 2010.

Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al Ghazali*, Jakarta, 1975.

Thomas Santoso. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta, 2002.

Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, 1994.

M. Mursyid PW *Unjuk rasa : Tinjauan dari Sudutu andang Edukasi dalam media Peduli* . <http://mmursyidpw.wordpress.com>.

Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan; Menilik Kelahiran UU Unjuk Rasa*, Jakarta, 1999.

Howard Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*, Penerjemah; Yusi A PareanomHoward Cincotta, *Garis Besar Sejarah Amerika*.

Hamid Bahri, *Para Diktator Terheboh di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, Jogjakarta, 2012.

Hamid Bahri, *Para Diktator terheboh di Dunia Yang Berhasil Digulingkan*, Jogjakarta , Flashbooks, 2012.

Muhammad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta, 1999.

James Luhulima, *Hari-Hari Panjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*, Jakarta, 2001.

Peri Herianto, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (Studi Kasus Unjuk Rasa di Makassar Tahun 2007-2008*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011.

B. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Negara Hukum.

Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 *Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*

C. INTERNET

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hosni Mubarak](http://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak)

<http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/01/tentang-anarkisme-bagian-I-apa-itu.html> Selasa, 27 Oktober 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Syukur lahir di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 November 1988 anak ke Tiga (3) dari Empat (4) bersaudara yakni buah hati Bapak Usman dengan Ibu Hapia. Pendidikan formal dimulai di SD Impres Mallengkeri Bertingkat I dan lulus pada tahun 1998, melanjutkan ke bangku MTsN Makassar dan dinyatakan lulus pada tahun 2005, setelah itu penyusun mendaftarkan dirinya ke SMA Somba Opu/Paket C dinyatakan lulus pada tahun 2010, tidak sampai disitu penyusun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011 dan menempuh Yudisium dan menyandang gelar Sarjana Hukum pada tahun 2017. Beberapa organisasi dan kegiatan yang diikuti selama menempuh pendidikan diantaranya Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kom. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya, LBH Sapma Pemuda Pancasila SUL-SEL, KNPI Kab. Gowa, MBH (Mari Berpendidikan Hukum) dan Bodrex LAW.